



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**PARTISIPASI PERSONEL TNI ANGKATAN LAUT (TNI AL)  
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA  
GEMPA SEPTEMBER 2009 DI SUMATERA BARAT**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

Oleh:

**WIDHY SUTEDJO  
NPM. 120120104080**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI STRATEGI DAN KAMPANYE MILITER**

**JAKARTA  
DESEMBER 2013**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Widhy Sutedjo

Nomor Mahasiswa : 120120104080

Program Studi : Strategi dan Kampanye Militer

Judul Tesis : **PARTISIPASI PERSONEL TNI ANGKATAN LAUT  
(TNI AL) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA  
GEMPA SEPTEMBER 2009 DI SUMATERA BARAT.**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan pembimbing II untuk diadakan ujian secara lisan dihadapan dewan penguji sebagai persyaratan untuk meraih gelar Magister Pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing I

Dr. Ir. Arsegianto, M.Sc

dr. Benyura Rimba, MARS  
Kolonel Ckm NRP 33717

Jakarta    Oktober 2013

Mengetahui  
Dekan Fakultas Strategi Pertahanan

Dr. U.H. Harahap, M.Si  
Marsekal Muda TNI

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Widhy Sutedjo  
Nomor Mahasiswa : 120120104080  
Program Studi : Strategi dan Kampanye Militer  
Judul Tesis : Partisipasi Personel TNI Angkatan Laut (TNI AL)  
Dalam Penanggulangan Bencana Gempa September  
2009 di Sumatera Barat.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Terapan bidang Pertahanan pada program studi Strategi dan Kampanye Militer Universitas Pertahanan Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Dosen Pembimbing I : Dr.Ir. Arsegianto, M.Sc ( )

Dosen Pembimbing II : Kol Ckm dr. Benyura Rimba, MARS ( )

Penguji I : Laksamana Muda TNI (Purn) Prof. Dr. Drg. Setyo  
Harnowo, Sp.BM (K) FICD., FICCD ( )

Penguji II : Dr. M.D. La Ode ( )

Penguji III : Brigjen TNI Herman, M. Si (Han) ( )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : Desember 2013

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan Rahmat dan Karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis dengan Judul “Partisipasi Personel TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam penanggulangan Bencana gempa September 2009 di Sumatera Barat”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Magister pada Program Pasca Sarjana di Universitas Pertahanan.

Tesis yang sangat sederhana ini dapat saya selesaikan berkat bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat berharga ini, tak lupa saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat :

- a. Rektor Universitas Pertahanan.
- b. Komandan Lantamal II beserta staf
- c. Gubernur Sumatera Barat beserta staf
- d. Wakil Rektor Universitas Pertahanan
- e. Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
- f. Kepala Prodi Strategi dan Kampanye Militer Universitas Pertahanan
- g. Dr. Ir. Arsegianto M. Sc, selaku Pembimbing I
- h. Kolonel Ckm dr. Benyura Rimba, MARS selaku Pembimbing II
- i. Walikota Padang beserta staf
- j. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat
- k. Kepala Kantor SAR Sumatera Barat
- l. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
- m. Ketua Kelompok Siaga Bencana Laut Biru
- n. Pemuka Masyarakat, LSM dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati saya mohon maaf bila dalam penulisan tesis ini ada kejanggalan-kejanggalan, akhirnya saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya.

Jakarta , September 2013

Penulis

Widhy Sutedjo

## **NAVY PERSONNEL PARTICIPATION MILITARY DISASTER IN SEPTEMBER 2009 WEST SUMATRA EARTHQUAKE**

### **ABSTRACT**

The difficulty of handling the West Sumatra earthquake in 2009, especially at the beginning of the emergency, would require appropriate and effective strategies. One of the efforts made to minimize and provide security for the victims is to involve of Navy personnel (AL) in disaster management. This study aims to clarify the role and participation of the Navy personnel in emergency response. In particular the role of the Navy in the distribution logistics during the earthquake of September 2009, Navy participation in the distribution logistics in disaster september2009 only refers to the logistic distribution pattern that has become the standard for the Navy. This is due to the lack of distribution logistics SOP at the time of disaster mitigation. The use of standards used because the Navy is driven also by the lack of a BPBDs in West Sumatra in 2009 that. The method used in this study is qualitative the use of this method is expected to reveal in-depth information. The role of the Navy as an emergency response team that has the ability to master the field when the 2009 earthquake in West Sumatra is much needed given the current disaster many land and air facilities are disrupted, then the sea lanes is one of effective disaster management strategies during emergency response. Some things are done by the Navy in the disaster relief efforts is to undertake data collection or extracting information, coordinate with stakeholders and agencies then make attempts to establish disaster management posts, and also conducted a series of attempts to distribute the logistics for the people affected disaster. Navy also actively participate in the activities of other emergency response is to lower the health care team who bring a hospital ship (KRI dr Soeharso), and provide two fleet logistics for distribution to areas that are difficult to reach.As well as participate in the reconstruction of the building and build a post-post displacement for disaster affected communities.

Keyword : Partitipation, logistic, disaster.

**PARTISIPASI PERSONEL TNI ANGKATAN LAUT (TNI AL)  
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA  
GEMPA SEPTEMBER 2009 SUMATERA BARAT**

**ABSTRAK**

Sulitnya penanganan bencana gempa bumi Sumatera Barat tahun 2009 terutama pada awal tanggap darurat, tentunya dibutuhkan strategi yang tepat dan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan memberikan rasa aman bagi korban bencana tersebut adalah dengan melibatkan personel TNI Angkatan Laut (AL) dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan partisipasi personel TNI AL pada tanggap darurat. Secara khusus mengenai peran TNI AL dalam pendistribusian logistik pada saat gempa bumi tanggal September 2009. Partisipasi TNI AL dalam pendistribusian logistik pada bencana september 2009 ini hanya mengacu kepada pola distribusi logistic yang telah menjadi standar baku TNI AL selama ini. Hal ini disebabkan belum adanya SOP tentang Distribusi logistik pada saat mitigasi bencana. Penggunaan standar baku yang digunakan TNI AL ini karena didorong pula oleh belum terbentuknya BPBD di Sumatera Barat pada tahun 2009 tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penggunaan metode ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi secara mendalam. Peran TNI AL sebagai tim tanggap darurat yang memiliki kemampuan penguasaan medan ketika bencana gempa tahun 2009 di Sumatera Barat ini sangat dibutuhkan mengingat saat terjadi bencana banyak fasilitas darat dan udara mengalami gangguan, maka jalur laut adalah salah satu strategi penanganan bencana yang efektif pada saat tanggap darurat. Beberapa hal yang dilakukan oleh TNI AL dalam upaya penanggulangan bencana tersebut adalah melakukan upaya pendataan atau penggalian informasi, berkoordinasi dengan para pihak dan instansi lalu melakukan upaya segera dengan membentuk pos-pos penanggulangan bencana, dan juga melakukan serangkaian upaya untuk mendistribusikan logistik bagi masyarakat yang terkena bencana. TNI AL juga secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tanggap darurat lainnya yaitu dengan menurunkan tim kesehatan yang membawa kapal rumah sakit (KRI dr Soeharso), serta menyediakan dua armada kapal untuk penyaluran logistik ke wilayah-wilayah yang sulit untuk dijangkau. Serta juga berperan serta dalam upaya rekonstruksi bangunan maupun membangun posko-posko pengungsian bagi masyarakat korban bencana.

Kata Kunci : Partisipasi, logistik, bencana.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Signifikansi Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
1.4.2.1 Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	6
1.4.2.2 Bagi Masyarakat .....	6
1.4.2.3 Bagi TNI AL.....	6
1.5 Pembatasan Masalah dan Sistematika Penelitia .....	6
1.5.1 Pembatasan Masalah .....	6
1.5.2 Sistematika Penelitian.....	7
<b>2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Kajian Pustaka .....	8
2.1.1 Konsep Partisipasi .....	9
2.1.1.1 Tingkat Keterlibatan .....	9
2.1.1.2 Cara Keterlibatan .....	10
2.1.1.3 Keterlibatan Dalam Berbagai Tahap Proses Pembangunan Yang Direncanakan .....	10
2.1.1.4 Tingkat Organisasi .....	10
2.1.1.5 Intensitas Aktivitas Partisipasi.....	11
2.1.1.6 Kisaran Aktivitas Yang Dapat Dijangkau.....	11
2.1.1.7 Tingkat Efektifitas.....	11
2.1.1.8 Siapa Yang Berpartisipasi.....	11
2.1.1.9 Tujuan dan Gaya Partisipasi .....	12
2.1.2 Manajemen Logistik Bencana .....	13
2.1.2.1 Pendistribusian Bantuan Logistik .....	17
2.1.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Logistik .....	18
2.1.3 Konsep Pendistribusian Logistik .....	20
2.1.3.1 Pengertian distribusi Logistik .....	20
2.1.3.2 Pengurangan Resiko Bencana .....	23

2.1.3.3	Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempa .....	26
2.1.3.4	Kebijakan Administratif.....	27
2.1.3.5	Kebijakan Teknis.....	28
2.1.4	Tugas dan Fungsi TNI AL .....	28
2.1.4.1	Fungsi .....	28
2.1.4.2	Tugas.....	29
2.2	Pendekatan Teori Yang Digunakan .....	30
2.3	Kerangka Pikir Penelitian .....	31
<b>3</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1	Metode Penelitian Kualitatif.....	35
3.2	Subjek dan Objek Penelitian .....	36
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4	Desain Penelitian .....	37
3.4.1	Teknik Penentuan Informan Penelitian .....	37
3.4.2	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4.3	Teknik Analisis Data.....	38
3.4.4	Validitas dan Reliabilitas .....	39
3.5	Prosedur Penelitian .....	40
3.5.1	Lokasi Penelitian.....	40
3.5.2	Waktu dan Jadwal Penelitian .....	40
<b>4</b>	<b>ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
4.1	Gambaran Sebaran Data/Subjek Penelitian .....	41
4.1.1	Kondisi Sosial Geografis Sumatera Barat .....	41
4.1.2	Kondisi Sosial Geografis Kota Padang .....	43
4.1.3	Profil 4 Kecamatan Dengan Populasi Penduduk Terpadat di Kota Padang .....	48
4.1.3.1	Kecamatan Padang Selatan .....	48
4.1.3.2	Kecamatan Padang Utara.....	49
4.1.3.3	Kecamatan Padang Barat.....	51
4.1.3.4	Kecamatan Padang Timur .....	52
4.1.4	Gempa Bumi dan Sumatera Barat .....	53
4.1.4.1	Sejarah Kegempaan di Sumatera Barat .....	53
4.1.4.2	Gempa Bumi Sumatera Barat 2009 .....	56
4.1.5	Karakteristik Informan Penelitian.....	59
4.2	Analisis Data dan Interpretasi Hasil .....	60
4.2.1	Kondisi Tanggap Darurat .....	60
4.2.2	Partisipasi Personel TNI AL Dalam Pendistribusian Logistik Pada Saat Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Gempa .....	66
4.2.3	Kendala Yang Dihadapi TNI AL Dalam Penanggulangan Bencana Khususnya Dalam Pendistribusian Logistik .....	82
4.3	Pembahasan .....	86
4.3.1	Partisipasi TNI AL dalam penanggulangan bencana .....	86

<b>5</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	107
5.1	Simpulan .....	107
5.2	Saran .....	108
5.2.1	Saran Akademik.....	108
5.2.2	Saran Praktik .....	109
	DAFTAR PUSTAKA.....	111

**DAFTAR BAGAN, TABEL DAN GAMBAR**

	Bagan Alur Pikir .....	34
	Tabel 4.1 Peruntukan Tanah di Kota Padang .....	44
	Tabel 4.2 Kecamatan di Kota Padang .....	45
	Tabel 4.3 Populasi Penduduk Berdasarkan Kecamatan .....	46
	Gambar Peta Kota .....	47
	Tabel 4.4 Penggunaan Lahan di Kecamatan Padang Selatan .....	49
	Tabel 4.5 Penggunaan Lahan di Kecamatan Padang Utara .....	50
	Tabel 4.6 Penggunaan Lahan di Kecamatan Padang Timur .....	53
	Tabel 4.7 Karakteristik Informan Penelitian.....	59
	Bagan 4.1 Pendistribusian Logistik .....	67
	Bagan 4.2 Garis Komando .....	69

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

UN *Global Assessment on Disaster Risk Reduction* tahun 2009 menyebutkan Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam, dimana lebih dari 600.000 orang setiap tahun menderita karenanya. Dalam kuartal pertama tahun 2011 saja, Indonesia telah mengalami 67 kali gempa bumi yang cukup besar (5,0 SR atau lebih). Letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor dan tsunami terus merupakan ancaman. Penanggulangan dan manajemen bencana merupakan agenda utama bagi pemerintah Indonesia dan para mitra Internasionalnya, termasuk PBB.<sup>1</sup>

Wilayah pesisir Sumatera Barat juga merupakan salah satu wilayah paling rawan terkena bencana terutama gempa bumi dan tsunami. Salah satu bencana gempa bumi yang cukup parah adalah gempa yang terjadi pada tahun 2009 di Sumatera Barat. Kompas<sup>2</sup> merilis berita bahwa korban gempa Sumatera Barat yang telah ditemukan mencapai 1.195 orang, dengan korban tewas terbanyak terdata ditemukan di Kabupaten Pariaman yaitu mencapai 675 orang.

Perincian mengenai korban dan kerusakan yang telah terdata adalah sebagai berikut: Korban tewas, 1.195 orang, korban luka berat, 1.214 orang, korban luka ringan 1.688 orang, warga hilang 1 orang. Rumah

---

<sup>1</sup> Manajemen bencana <http://www.un.or.id/id/apa-yang-kami-lakukan/kemitraan-pembangunan/manajemen-bencana>

<sup>2</sup><http://regional.kompas.com/read/2009/10/15/1023516/1.117.Orang.Meninggal.akibat.Gempa.Sumatera.Barat>

rusak berat 135.448 unit, rumah rusak sedang 65.380 unit, rumah rusak ringan 78.604 unit.

Sedangkan korban yang telah terdata berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut : Kota Padang: 313 orang, Kabupaten Padang Pariaman 675 orang, Kota Pariaman 37 orang, Kabupaten Pesisir Selatan 11 orang, Kota Solok 3 orang, Kabupaten Agam 80 orang, Kabupaten Pasaman Barat 5 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa daerah yang terparah dengan korban jiwa terbanyak adalah Kota Padang dan Padang Pariaman.

Jika merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh LIPI mengenai Megatrast atau gempa besar yang diprediksikan akan terjadi, maka perkiraan daerah yang kena bencana dibandingkan dengan gempa 2009 akan sangat jauh lebih besar yaitu perkiraan skala diatas 8 maka daerah sepanjang pantai barat Sumatera akan kena bencana terdiri dari, Provinsi Sumatra Barat : Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Propinsi Bengkulu Kabupaten Muko-muko, Provinsi Sumatera Utara : Nias dan Sibolga. Melihat begitu besar daerah yang kena bencana dan mungkin juga korban nyawa begitu banyak tentunya hal ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah daerah sendiri, diperlukan peran aktif dari pemerintah pusat. Selanjutnya petugas terlatih baik dari kalangan TNI, Polri dan Sipil (BPBD,Basarnas) yang berada di daerah tentunya tidak bisa diandalkan, hal ini karena yang bersangkutan juga merupakan bagian yang kena bencana.

Besarnya jumlah korban jiwa dan kerusakan fisik yang terjadi akibat gempa tersebut telah menyebabkan kesulitan dalam upaya tanggap darurat terutama evakuasi dan pendistribusian logistik bantuan. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan personel terlatih dan

memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar distribusi logistik tersebut.

Salah satu institusi yang memiliki sumber daya dan keahlian dalam menangani kondisi seperti ini adalah Tentara Nasional Indonesia. TNI sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 pasal 4 ayat 1 terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap angkatan yang telah disebutkan di atas mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

Selanjutnya, pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan: Operasi Militer untuk Perang, Operasi Militer Selain Perang. Dan salah satu bentuk operasi militer selain perang yang dimaksud tersebut adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Keberadaan TNI Angkatan Laut dalam pendistribusian logistik ini sangat penting karena selain memiliki skill yang terlatih dan peralatan penunjang yang mumpuni, TNI juga berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjamin logistik terdistribusi dengan baik sesuai lokasi, karena jika bukan personel TNI yang melakukan distribusi logistik bantuan ini sangat dimungkinkan akan terjadi upaya-upaya pembajakan logistik yang tentunya akan merugikan masyarakat korban bencana.

Kebutuhan mendesak akan personel TNI khususnya Angkatan Laut adalah saat bencana baru saja terjadi atau saat status tanggap darurat ditetapkan. Hal ini terlihat dengan begitu terstrukturnya koordinasi TNI dalam upaya penanganan tanggap darurat bencana Sumatera Barat ini. Beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh TNI dalam upaya tanggap darurat bencana gempa Sumatera Barat ini adalah dengan mengirimkan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) yang terdiri dari unsur TNI dari ketiga angkatan.

Dalam upaya menunjang efektifitas pendistribusian logistik bantuan bencana tersebut, TNI Angkatan Laut mengerahkan empat KRI jenis Landing Ship Tank (LST), satu KRI jenis Landing Platform Dock (LPD), satu KRI jenis kargo, satu KRI jenis Rumah Sakit (KRI Dr. Soeharso) dengan satu helikopter onboard<sup>3</sup>.

Melihat begitu pentingnya peran TNI dalam menanggulangi bencana terutama pada saat tanggap darurat, penulis tertarik untuk mengkaji partisipasi TNI AL pada gempa di Sumatera Barat, dengan mengangkat judul “Partisipasi Personel TNI Angkatan Laut (AL) Dalam Penanggulangan Bencana Gempa September 2009 di Sumatera Barat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana peran dan partisipasi personel TNI AL pada saat tanggap darurat penanggulangan bencana gempa Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam pendistribusian Logistik ?

---

<sup>3</sup> <http://news.detik.com/read/2009/10/03/143822/1214472/10/tanggap-darurat-gempa-sumbar-tni-maksimalkan-pasukan-di-daerah>

### **1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Menjelaskan peran dan partisipasi personel TNI AL pada tanggap darurat penanggulangan bencana gempa Provinsi Sumatera Barat dalam pendistribusian logistik bencana gempa bumi tanggal 30 September 2009.

#### **1.3.2 Signifikansi Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam hal menanggulangi akibat bencana alam dan pemberian bantuan kemanusiaan. Untuk mengefektifkan pendistribusian logistik dalam tanggap darurat menanggulangi bencana alam tersebut diperlukan upaya yang sistematis dan terpadu secara bersama dengan melibatkan unsur TNI, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai partisipasi TNI Angkatan Laut dalam pendistribusian logistik pada saat tanggap darurat bencana gempa bumi. Hasil penelitian ini akan sangat berguna dan dapat dijadikan referensi terhadap pemberian bantuan TNI dalam menanggulangi akibat bencana gempa bumi serta diharapkan dapat dijadikan acuan di masa yang akan datang di kalangan TNI dan pihak-pihak terkait.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkuat pemahaman dalam bidang penanggulangan bencana bagi TNI AL. Sesuai dengan keilmuan yang penulis pelajari sehingga menjadi referensi untuk menyusun perencanaan

penanggulangan bencana gempa yang lebih baik sehingga dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

**1.4.2.1 Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**, penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan penanggulangan bencana, sehingga partisipasi pelaksanaan dan penganggaran kegiatan pengurangan risiko bencana mencapai hasil yang maksimal.

**1.4.2.2 Bagi masyarakat**, penelitian ini diharapkan mampu mengurangi kerugian yang timbul di masyarakat seperti kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat lainnya.

**1.4.2.3 Bagi TNI AL**, dapat dijadikan masukan yang membangun berdasarkan hasil analisa dan rekomendasi tentang partisipasi pelibatan TNI AL dalam penanggulangan gempa, khususnya pada pendistribusian logistik.

#### **1.5 Pembatasan Masalah dan Sistematika Penelitian**

##### **1.5.1 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, yang menjadi ruang lingkup adalah :

- a. Penelitian difokuskan pada peran dan partisipasi personel TNI AL dalam pendistribusian logistik pada saat tanggap darurat bencana gempa bumi Sumatera Barat tahun 2009.
- b. Penelitian dibatasi pada proses distribusi logistik pada tahap tanggap darurat berdasarkan kejadian pasca gempa bumi tanggal 30 September 2009.

### **1.5.2 Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika yang disusun sebagai berikut :

#### **Bab I. Pendahuluan**

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian serta ruang lingkup.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran**

Dalam bab ini dikemukakan konsep dan teori dari berbagai pendapat ahli dalam berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.

#### **Bab III Metode Penelitian**

Dalam bab ini dikemukakan metode yang digunakan, sumber data/subjek/ obyek penelitian, desain dan prosedur penelitian.

#### **Bab IV Analisis Data dan Hasil Penelitian**

Dalam bab ini dikemukakan gambaran sebaran data, analisis data, dan hasil penelitian, serta pembahasan.

#### **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan beberapa saran yang belum dibahas dalam penelitian.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Bab 2 merupakan kajian pustaka yang akan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan fokus kajian yakni penekanan pada penjelasan partisipasi, logistik dan konsep lainnya yang mendukung penjabaran tinjauan pustaka. Dalam pustaka juga menjelaskan pendekatan teori yang digunakan kemudian diintisarikan dalam bentuk kerangka pikiran.

Setiap individu di dalam masyarakat memiliki status atau kedudukan, tidak jarang anggota masyarakat memiliki banyak status atau kedudukan, yang berdampak banyaknya peran-peran yang harus dilakukan. Apalagi peran menurut (Henslin, 2006:95) merupakan sesuatu yang hakiki dalam kehidupan sosial, karena peran merupakan suatu perilaku, kewajiban, dan hak-hak yang melekat pada status<sup>4</sup>. Begitu juga TNI AL kedudukan atau statusnya sebagai TNI AL telah melekat pula peran-peran yang harus dilakukannya, dalam kondisi di mana tugas-tugas yang dilakukan sesuai dengan kedudukan, maka ketika bertugas pada penanggulangan gempa Sumatera Barat, TNI AL sudah mengambil peran sebagai tentara nasional yang harus siap diterjunkan pada saat terjadi bencana. Peran yang akan dijelaskan disini adalah dalam bentuk partisipasi TNI AL dalam penanggulangan bencana gempa Sumatera Barat khususnya dalam pendistribusian logistik yang akan tergambarkan dalam partisipasi yang dilakukan TNI AL.

---

<sup>4</sup> Henslin, James M. 2006. Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi. Jakarta : Erlangga.

### 2.1.1 Konsep Partisipasi

Davis (*dalam* Rizqina, 2010:15) mengatakan "Partisipasi didefinisikan sebagai mental dan Keterlibatan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab di dalamnya"<sup>5</sup>. Selanjutnya Dusseldorp (*dalam* Sunarti, 2012:2)<sup>6</sup> mengelompokkan partisipasi menjadi beberapa aspek yaitu:

#### 2.1.1.1 Tingkat Keterlibatan

Berdasarkan tingkat keterlibatannya, partisipasi dibedakan lagi menjadi partisipasi bebas, partisipasi dipaksa, dan partisipasi biasa. Partisipasi bebas digunakan untuk bagi seorang individu yang melibatkan dirinya sendiri secara sukarela dalam aktivitas partisipasi spesifik. Partisipasi bebas dapat dibagi lagi menjadi partisipasi spontan dan partisipasi yang dibangkitkan. Seseorang dikatakan berpartisipasi spontan bila berpartisipasi atas pendiriannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh program penyuluhan dari suatu institusi maupun individu, sebaliknya seseorang dikatakan berpartisipasi yang dibangkitkan jika keikutsertaannya setelah dia diyakinkan melalui program penyuluhan atau pengaruh lain dari suatu institusi maupun individu.

Partisipasi dipaksakan dibedakan lagi menurut sumber pemaksaan yaitu melalui hukum dan pemaksaan sebagai akibat kondisi sosial ekonomi. Partisipasi biasa digambarkan untuk keikutsertaan seseorang yang paling tidak dalam sebagian waktunya, untuk memilih pola partisipasinya, sehubungan dengan fakta seseorang dilahirkan sebagai laki-laki atau

---

<sup>5</sup> Rizqina, Finna. 2010. Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan berbasis sekolah di kecamatan kalideres kotamadya Jakarta barat. Pasca sarjana Universitas Indonesia

<sup>6</sup> Sunarti, Euis. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/03/Dr.-Euis-Sunarti-Partisipasi-Masyarakat-dalam-Pembangunan-Masyarakat.pdf>.

perempuan, dalam suatu keluarga dari kelas tertentu, kasta, suku bangsa atau ras dan dalam suatu area.

#### **2.1.1.2 Cara Keterlibatan**

Berdasarkan cara keterlibatannya, partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi langsung dan tak langsung. Partisipasi langsung digunakan untuk menggambarkan keikutsertaan seseorang secara langsung dalam proses partisipasi seperti mengikuti pertemuan, diskusi, menyediakan tenaganya untuk proyek, memberikan suara bagi calon yang akan mewakilinya di luar kelompoknya.

Partisipasi tak langsung digunakan untuk menggambarkan keikutsertaan seseorang yang mewakilkan hak berpartisipasi (sebagai contoh dalam pengambilan keputusan) ke orang lain yang kemudian dapat mewakilinya dalam aktivitas partisipatif pada tingkat yang lebih tinggi.

**2.1.1.3 Keterlibatan dalam berbagai tahap proses pembangunan yang direncanakan.** Berdasarkan hal tersebut, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi pada seluruh tahap dan partisipasi pada sebagian tahap.

#### **2.1.1.4 Tingkat Organisasi**

Berdasarkan tingkat organisasinya, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi terorganisasi dan tak terorganisasi. Partisipasi terorganisasi digunakan jika struktur organisasi dan satu set prosedur dikembangkan dalam proses persiapannya. Organisasi dapat diformalkan lebih tinggi dengan menggunakan peraturan dan hukum.

Berdasarkan hal tersebut partisipasi terorganisasi dibedakan lagi menjadi terorganisasi formal dan terorganisasi tidak formal. Partisipasi tidak terorganisasi. digunakan jika keikutsertaan seseorang karena kondisi

darurat atau kejadian khusus. Hal ini dapat menjadi awal dari partisipasi terorganisasi.

#### **2.1.1.5 Intensitas Aktivitas Partisipasi**

Berdasarkan intensitas aktivitasnya, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi intensif dan partisipasi ekstensif. Partisipasi dikatakan Intensif jika frekuensi aktivitas partisipasinya tinggi seperti pertemuan setiap minggu, pertemuan kelompok reguler untuk membangun aktivitas tertentu. Partisipasi dikatakan ekstensif jika aktivitas partisipasinya dilakukan secara tidak teratur dan dengan internal yang luas.

#### **2.1.1.6 Kisaran Aktivitas yang dapat Dijangkau**

Berdasarkan kisaran aktivitas yang dapat dijangkau, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi tidak terbatas dan partisipasi terbatas. Partisipasi dikatakan tak terbatas jika seluruh usaha yang dapat dikontrol manusia, mempengaruhi komunitas tertentu, dapat dikontrol oleh aktivitas partisipasi dari anggota komunitas tersebut. Partisipasi terbatas digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika melalui aktivitas partisipasi, hanya sebagian aspek kehidupan (sosial, politik, lingkungan fisik dan administratif) yang dapat dipengaruhi.

#### **2.1.1.7 Tingkat Efektifitas**

Berdasarkan tingkat efektifitasnya, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi efektif dan partisipasi inefektif. Partisipasi efektif digunakan jika aktivitas partisipasi menghasilkan terealisasinya seluruh tujuan, sedangkan partisipasi inefektif terjadi jika tidak ada, atau hanya sedikit dari tujuan yang terealisasi.

#### **2.1.1.8 Siapa yang Berpartisipasi**

Berdasarkan pelaku yang berpartisipasi dapat dibedakan menjadi anggota komunitas lokal (penduduk, pemimpin), anggota pemerintahan, dan pihak luar.

### 2.1.1.9 Tujuan dan Gaya Partisipasi

Berdasarkan tujuan dan gayanya (*style*), partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi dalam pembangunan daerah, dan partisipasi dalam perencanaan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Model praktek organisasi komunitas identik dengan pembangunan komunitas dan bertujuan melibatkan masyarakat dalam pembangunan mereka sendiri. Satu dari tujuannya adalah untuk merangsang partisipasi (*process goal*) dan untuk mengumpulkan energi sosial yang dapat membawa mereka untuk menolong dirinya sendiri.

Tujuan utama melibatkan masyarakat dalam perencanaan sosial adalah untuk mendekatkan program sebisa mungkin terhadap *feltneed* mereka dan untuk membuat program lebih efektif.

Sedangkan tujuan utama dari tipe partisipasi dalam aksi sosial adalah untuk meningkatkan kekuatan hubungan dan akses terhadap sumber daya. Fokus utama adalah terhadap suatu segmen dari komunitas. Sebagaimana dalam pembangunan lokal, perambatan partisipasi diantara target grup merupakan satu tujuan penting. Aksi sosial secara erat berkaitan dengan perencanaan inovatif.

Untuk mendefinisikan tentang partisipasi yang bersifat analitis, standar dan universal, bukanlah suatu hal yang mudah. Istilah partisipasi lazim digunakan dalam melihat model keterlibatan masyarakat misalnya partisipasi program, partisipasi pengajaran, dan partisipasi pengelola.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa partisipasi pelibatan personel TNI AL dalam bencana adalah suatu upaya yang dilakukan negara dalam rangka menyelesaikan proses tanggap darurat penanganan bencana secara sesuai antara hasil dan tujuan yang ingin dicapai.

Secara etimologis partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut

Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.. Dengan demikian, Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik TNI Angkatan Laut dalam memberikan respon tanggap darurat terhadap bencana gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat dalam rangka mendukung pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah hal yang bersangkutan paut dengan keberhasilan, manfaat dan seberapa target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai dari suatu perlakuan yang diterapkan. Selanjutnya jika dihubungkan dengan keterlibatan TNI AL dalam upaya penanggulangan bencana dapat juga dilihat sebagai suatu ukuran sejauh mana keberhasilan upaya penanggulangan bencana Sumatera Barat yang dilakukan dengan melibatkan komponen TNI AL.

### **2.1.2 Manajemen Logisti Bencana**

Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) PP Muhammadiyah<sup>7</sup> menyebutkan bahwa manajemen logistik, selain sebagai support kebutuhan utama masyarakat terkena dampak bencana juga jaminan pemulihan fungsi sosial masyarakat. LPB PP Muhammadiyah menyebutkan bahwa sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana merupakan suatu sistem yang harus memenuhi beberapa persyaratan seperti : dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan

---

<sup>7</sup> <http://www.mdmc.or.id/index.php/download-file/category/6-panduan-tanggap-darurat?download=12:manajemen-logistik-tanggap-darurat>  
<http://www.bnpb.go.id/uploads/pubs/561.pdf>.

standar pelayanan; sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara; distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus (karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana); inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggung jawaban logistik dan peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus; memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana; koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi yang terbatas; kemungkinan bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri, atas komando yang berwenang; dan memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik (2009 : 5-8)<sup>8</sup>, penyelenggaraan bantuan logistik tersebut terdiri atas strategi dan kebijakan.

Strategi bantuan logistik merupakan perencanaan umum dalam rangka mengelola bantuan logistik penanggulangan bencana. Strategi dalam bantuan logistik ini adalah adanya koordinasi dan dukungan logistik dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedangkan kebijakan bantuan logistik merupakan pelaksanaan prioritas pengelolaan bantuan logistik penanggulangan bencana yang meliputi: bantuan logistik penanggulangan bencana diberikan kepada daerah pada keadaan darurat bencana sesuai kebutuhan; bantuan logistik penanggulangan bencana diberikan kepada daerah rawan bencana

---

<sup>8</sup> <http://www.bnpb.go.id/uploads/pubs/54.pdf>.

sebagai bufer stok dalam rangka kesiapsiagaan; diberikan kepada pemerintah daerah/ BPBD dan atau instansi/lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana; dan bantuan logistik penanggulangan bencana harus menjamin jumlah, mutu, sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.

Pola penyelenggaraan bantuan logistik dilaksanakan dengan menganut pola penyelenggaraan yang melibatkan beberapa lembaga/Instansi dalam sistem kelembagaan dalam berbagai wilayah yang dilaksanakan secara terpadu: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Masing-masing tingkat kelembagaan dalam menyelenggarakan bantuan logistik penanggulangan bencana menggunakan mekanisme bantuan logistik, yang pada masing-masing tingkatan memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pola penyelenggaraan bantuan logistik secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dengan pola sebagai berikut :

Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota dan Provinsi, BNPB mengerahkan sumber daya logistik dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) regional, instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.

Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka BNPB dapat mengerahkan bantuan kepada BPBD Provinsi lain, atau sumber lain baik dari dalam dan luar negeri.

Apabila terdapat keterbatasan bantuan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan dana siap pakai khusus digunakan pada saat tanggap darurat dan sumber dana lain yang sudah dialokasikan.

Selanjutnya pola penyelenggaraan bantuan logistik Provinsi yang dilakukan oleh pemerintah tingkat I adalah dengan pola sebagai berikut :

Dalam hal bencana di Provinsi, BPBD Provinsi yang terkena bencana mengerahkan sumber daya logistik dari Instansi/Lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.

Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuan logistik kepada Provinsi lain yang terdekat.

Apabila Provinsi yang diminta bantuan tidak memiliki ketersediaan sumber daya logistik/tidak mencukupi, maka pemerintah Provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat (BNPB).

Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan logistik ini ditanggung oleh pemerintah Provinsi yang bersangkutan.

Pelaksanaan pengerahan sumber daya logistik dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/kendali Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan. Serta pengerahan bantuan logistik di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

Dalam hal bencana di Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten/Kota yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya logistik dari instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.

Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat meminta bantuan logistik kepada pemerintah Kabupaten/Kota terdekat baik dalam satu wilayah Provinsi maupun Provinsi lain.

Apabila pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta bantuan peralatan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan logistik kepada pemerintah Provinsi yang bersangkutan.

Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan peralatan ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pelaksanaan pengerahan bantuan logistik dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/kendali Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

#### **2.1.2.1 Pendistribusian Bantuan Logistik**

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Distribusi Bantuan Logistik Nomor 10 Tahun 2012 dijelaskan bahwa distribusi adalah suatu sistem penyaluran dan atau pembagian bantuan logistik dalam rangka penanggulangan bencana dari daerah asal ke daerah tujuan sampai pada sasaran yang dituju.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik (2009 : 11-12) Distribusi bantuan logistik untuk penanggulangan bencana dilaksanakan dengan ketentuan dan berdasarkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan kebutuhan dan permintaan bantuan, harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dibidang penanggulangan bencana.
- b. Data penerima bantuan, waktu pendistribusian, alat transportasi yang digunakan.
- c. Inisiatif dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana.
- d. Data penerima bantuan, waktu penyampaian, alat transportasi yang digunakan.

- e. Petugas pendistribusian menyampaikan bantuan logistik kepada penerima.
- f. Sisa bantuan logistik yang selesai digunakan diperlakukan dengan cara:
  - a) Dihilangkan kepemilikannya dan menjadi stok penyangga gudang di daerah.
  - b) Barang logistik yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan barang logistik harus memperhatikan kepada hal-hal sebagai berikut:
    - (a) Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan surat keputusan penghapusan.
    - (b) Setelah dilakukan penghapusan dilanjutkan dengan berita acara pemusnahan.
    - (c) Penghapusan didasarkan kepada peraturan yang berlaku.

#### **2.1.2.2 Pelaksanaan pengelolaan logistik**

Pelaksanaan pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat mencakup langkah-langkah aktivasi, penerimaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi bantuan logistik.

Langkah-langkah aktivasi dalam pengelolaan bantuan logistik adalah, mengaktifkan bidang logistik dari pos komando pada status keadaan darurat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Mendukung penyelenggaraan pos komando tanggap darurat. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dari instansi/lembaga/ organisasi yang terkait.

Langkah-langkah penerimaan dalam pengelolaan bantuan logistik adalah dengan mencatat jenis, jumlah dan mutu logistik yang diterima dari berbagai sumber. Menyeleksi dan mencocokkan bantuan logistik sesuai

skala prioritas kebutuhan. Menyimpan logistik ditempat yang mudah diakses. Sedangkan sumber penerimaan logistik dapat berasal dari dalam dan luar negeri antara lain dari masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha.

Selanjutnya proses penerimaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana dimulai dari pencatatan dan pengecekan, sumber bantuan, waktu diterima, jenis dan jumlah bantuan, cara penyimpanan, transporter, sasaran penerima bantuan, yang dilaksanakan oleh koordinator bidang logistik.

Langkah-langkah penyimpanan dalam pengelolaan bantuan logistik yaitu dengan ; Memilih gudang dengan memperhatikan tempat, tipe gudang, kapasitas, fasilitas, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai ketentuan yang berlaku. Menyimpan bantuan logistik di gudang, dengan melakukan pencatatan, pemilahan dan penyusunan barang logistik disesuaikan dengan jenisnya serta pengecekan stok barang logistik secara periodik. Menata kelola bantuan logistik sehingga memudahkan dalam penerapan system "*First-In First-Out*", *First Expired First Out*. Menjaga bantuan logistik dari kerusakan dan kehilangan maupun berkurangnya standar mutu.

Langkah-langkah pengangkutan dalam pengelolaan bantuan logistik adalah dengan mengangkut dan atau memindahkan logistik dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima. Menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dari gudang ke tujuan. Mempercepat penyampaian. Jenis pengangkutan terdiri dari angkutan darat, air dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku. Pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan: skala prioritas kebutuhan; jenis dan jumlah bantuan logistik; situasi dan kondisi keadaan darurat; ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;

kondisi wilayah asal dan tujuan; efektifitas dan efisiensi; keamanan dan keselamatan.

Untuk mengantisipasi terjadinya distribusi yang tidak seimbang maka pengangkutan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan bantuan logistik yang harus dilengkapi dengan data (jenis, jumlah, tujuan, pengirim, transporter termasuk pengawalan, dan penerima), dan berita acara serah terima barang.

### **2.1.3 Konsep Pendistribusian Logistik**

#### **2.1.3.1 Pengertian Distribusi logistik**

Simatupang (2011:37)<sup>9</sup> menyebutkan bahwa distribusi adalah langkah-langkah yang diambil untuk memindahkan dan menyimpan barang dari tahap pemasok ke tahap pelanggan pada suatu rantai pasok. Distribusi berpengaruh langsung terhadap ongkos dan pengalaman pelanggan dan karena itu mendorong laba. Pilihan jaringan distribusi dapat mencapai tujuan rantai pasok mulai dari ongkos terendah sampai ketanggapan tinggi.

Sedangkan logistik dalam buku, *The World Book Encyclopedia Dictionary* yang dikutip oleh H. Subagya M. Suganda disebutkan bahwa : "Logistik is the art of supply : logistiks is the arithmetical calculation". (Subagya, Manajemen Logistik, 1988 : 4)<sup>10</sup>.

Bila diterjemahkan secara bebas mengenai logistik merupakan salah satu kegiatan yang bersangkutan dengan segi-segi: Perencanaan dan pengembangan, pengadaan, penyimpanan, pemindahan, penyaluran,

---

<sup>9</sup> Simatupang, M. Togar. 2011. Pengantar Logistik dan Distribusi. Disampaikan pada Kuliah Umum di Lingkungan Kementerian Perdagangan – Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi. Jakarta <http://www.slideshare.net/togar/logistik-dan-distribusi-5-desember-2011>

<sup>10</sup> Subagya, H (1988). Manajemen Logistik. C. V. Haji Masagung. Jakarta

pemeliharaan, pengungsian dan penghapusan alat alat perlengkapan. Pemindahan, pengungsian dan perawatan personel. Pengadaan dan pembuatan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan penghapusan fasilitas-fasilitas. Pengusahaan atau pemberian layanan atau bantuan dalam hal ini mencakup perencanaan termasuk pula penentuan kebutuhan-kebutuhan serta penggunaannya<sup>11</sup>. Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material-material/alat-alat.

Dari uraian di atas, dapat dijabarkan bahwa logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material-material/alat-alat.

Dalam kondisi bencana, agar sistem distribusi logistik berjalan efektif maka dibutuhkan suatu manajemen logistik. BNPB mengartikan logistik sendiri sebagai sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembako (sembilan bahan pokok), obat, pakaian dan kelengkapannya, air, jas tidur dan sebagainya.

Jadi distribusi logistik bencana, dapat pula diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk memindahkan dan menyimpan barang dengan perencanaan dan pengembangan, pengadaan, penyimpanan, pemindahan, penyaluran, pemeliharaan, pengungsian dan penghapusan alat alat. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai suatu ilmu

---

<sup>11</sup> <http://wisnu.blog.stisitelkom.ac.id/files/2011/12/Pengertian-Logistik.doc>.

pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material-material/alat-alat<sup>12</sup>.

Istilah logistik bencana dapat dikatakan merupakan pengindonesiaan terhadap terminologi *humanitarian logistiks* atau *emergency logistiks*, dapat dipahami sesuai kutipan berikut :

Proses perencanaan, penerapan, dan pengawasan/ pengendalian pengaliran maupun penyimpanan berbagai barang dan material maupun informasi yang efektif maupun efisien dari sisi biaya, dari titik asal hingga sampai ke titik penggunaan (oleh para korban bencana), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna tersebut". Sehingga terlihat adanya beberapa kata kunci: proses, perencanaan, penerapan, pengawasan, pengaliran, penyimpanan, barang/ bantuan, informasi, efisiensi, efektivitas, titik asal, titik penggunaan, dan (terutama) pengguna atau para korban (Setiawan, 2010)<sup>13</sup>.

Oleh karena itu (Setiawan, 2010) menjelaskan sebagai bidang yang masih baru, setidaknya terdapat kebutuhan-kebutuhan riil berikut ini di dalam kaitannya dengan logistik bencana:

- a. Penentuan lokasi pusat distribusi bantuan maupun lokasi pengungsian sementara;
- b. Penentuan skema alokasi bantuan (baik berupa barang maupun tenaga medis/ paramedis) secara efektif dan efisien;
- c. Perancangan jaringan distribusi bantuan yang mampu meningkatkan kinerja pemberian bantuan di masa mendatang; dan

---

<sup>12</sup> [http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pemasaran/Bab\\_8.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pemasaran/Bab_8.pdf). [26/06/2013]

<sup>13</sup> Setiawan, Eko. Seri Bencana: Logistik di dalam Konteks Manajemen Bencana. <http://umum.kompasiana.com/2010/04/18> (27/06/13)

- d. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari berlangsungnya tiga aktivitas pertama.

Thomas dan Kopczak (2005) dikutip Setiawan (2010)<sup>14</sup> mengemukakan alasan-alasan berikut mengenai pentingnya logistik bencana:

- a. Logistik bencana amatlah krusial di dalam kaitannya dengan efektivitas dan kecepatan respons dari program-program bantuan bencana, misalnya kesehatan, makanan, lokasi bagi para pengungsi, air, dan sanitasi;
- b. Penyediaan dan transportasi bantuan bagi korban bencana merupakan salah satu bagian paling mahal di dalam upaya-upaya pemberian bantuan; dan
- c. Data yang tersimpan baik dari berlangsungnya logistik bencana amat berguna sebagai bahan kajian pasca-bencana.

### **2.1.3.2 Pengurangan Risiko Bencana**

Menurut BAKORNAS PB (Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, 2006), salah satu pengertian paling sederhana tentang bencana adalah adanya kerugian pada hidup dan kehidupan suatu masyarakat sebagai dampak dari suatu kejadian yang disebabkan gejala alam ataupun ulah manusia. Kalau bencana diartikan seperti ini, maka tujuan utama dari penanganan bencana adalah untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang dihadapi masyarakat. Pertanyaan sentral berikutnya adalah strategi apa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi *pertama* adalah dengan mencegah kejadiannya, yaitu dengan sama sekali menghilangkan atau secara signifikan mengurangi kemungkinan dan peluang terjadinya fenomena yang berpotensi merugikan tersebut. Kalau ini tidak dapat dicapai, maka strategi *kedua* adalah dengan melakukan berbagai cara

---

<sup>14</sup> Setiawan, Eko. Seri Bencana: Logistik di dalam Konteks Manajemen Bencana. <http://umum.kompasiana.com/2010/04/18>

untuk mengurangi besarnya dan keganasan kejadian tersebut dengan mengubah karakteristik ancamannya, meramalkan atau mendeteksi potensi kejadian, atau mengubah sesuai unsur-unsur struktural dan nonstruktural dari masyarakat. Jika kejadian memang tidak dapat dihindarkan atau dikurangi, maka strategi *ketiga* adalah dengan mempersiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menghindari atau merespon kejadian tersebut secara efektif sehingga kerugian dapat dikurangi. Strategi yang *keempat* adalah dengan secepatnya memulihkan masyarakat korban bencana dan membangun kembali sembari menguatkan mereka untuk menghadapi kemungkinan bencana masa depan. Jadi strategi penanganan bencana jelas-jelas bukan dan tidak terbatas pada respon kedaruratan saja.

Selama ini penanganan bencana difokuskan pada saat kejadian bencana melalui pemberian bantuan darurat (*relief*) berupa : pangan, penampungan, dan kesehatan. Tujuan utama penanganan seperti ini adalah untuk meringankan penderitaan korban, kerusakan ketika terjadi bencana, dan segera mempercepat pemulihan(*recovery*).

Dari respon darurat ke manajemen risiko : pergeseran ini mendorong perubahan radikal cara pandang. Tadinya, penanganan bencana dipandang sebagai rangkaian tindakan khusus terbatas pada keadaan darurat, dilakukan oleh para pakar saja, kompleks dan mahal, serta cepat. Sekarang, penanganan bencana harus dilihat sebagai suatu paket kegiatan baik ada kedaruratan ataupun tidak. Titik beratnya bukan lagi bagaimana merespon kedaruratan melainkan bagaimana melakukan manajemen risiko sehingga dampak merugikan dari suatu kejadian dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Aspek-aspek penanganan bencana harus dipadukan dalam keseharian aspek-aspek pembangunan dan hajat pemerintahan justru pada saat keadaan normal. Dengan demikian, penanganan bencana membuka diri terhadap peran serta masyarakat dan dunia usaha pada berbagai tahap penanganan bencana.

Kemudian perubahan paradigma penanganan bencana mulai bergeser ke arah pengurangan risiko bencana yaitu kombinasi dari sudut pandang teknis dan ilmiah terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politis, dan menganalisis risiko bencana, ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan mengurangi risiko, dan juga mengurangi terjadinya bencana. Kegiatannya dilakukan bersama oleh semua para pihak (*stakeholder*) dengan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan ini menekankan pada bahaya dan kerentanan, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko, gejala alam dapat menjadi bahaya, jika mengancam manusia dan harta benda. Bahaya akan berubah menjadi bencana jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat.

Fokus utama dalam pengurangan risiko bencana adalah:

- a. Pengaturan legalitas bagaimana pengurangan risiko bencana menjadi prioritas nasional. Memperkuat kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam membagi tanggung jawab.
- b. Perumusan kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi kedalam perumusan kebijakan pembangunan.
- c. Perencanaan dan pembangunan
  - a) Pengurangan risiko bencana menjadi rencana strategi instansi pusat ke daerah.
  - b) Mekanisme untuk menjamin bahwa bencana tidak akan merusak proyek pembangunan.
  - c) Dan proyek pembangunan tidak meningkatkan risiko bencana kepada masyarakat.
  - d) Mekanisme koordinasi instansi atau lembaga terlibat dalam pengurangan risiko bencana.
- d. Dukungan pelaksanaan
  - a) Pengurangan risiko bencana menjadi strategi dari instansi atau lembaga dalam pembangunan.

- b) Sasaran yang dituju mengenal ancaman akan ancaman risiko yang dihadapi serta cara mengatasinya.
- c) Adanya pengaturan kerjasama, kemitraan, dan koalisi untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana.

### **2.1.3.3 Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempa**

Berdasarkan peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 02 tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan dasar dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana dari tingkat nasional hingga tingkat Kabupaten/Kota. Pada prinsipnya, fungsi dari kajian dan peta risiko bencana adalah memberikan landasan yang kuat kepada daerah untuk mengambil kebijakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitasnya hingga mampu mengurangi jumlah jiwa terpapar serta mengurangi kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan bila bencana terjadi.

Kondisi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah memperlihatkan bahwa pada umumnya beberapa komponen dasar sebagai pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah masih membutuhkan perkuatan. Selain itu upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang langsung berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah jiwa terpapar dan potensi kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan juga masih belum terfokus dan berdampak signifikan. Oleh karenanya kebijakan penanggulangan bencana perlu dibagi menjadi 2 komponen umum yaitu : kebijakan yang bersifat administratif dan kebijakan yang bersifat teknis.

Kebijakan ini saling mendukung dan saling terikat. Perbedaan sifat bertujuan untuk memperjelas maksud dan jenis kebijakan tanpa perlu memperjelas perbedaan ini dalam penulisan dokumen kebijakan tersebut. Seluruh kebijakan penanggulangan bencana dirangkum dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). RPB merupakan

salah satu mekanisme yang dilembagakan untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam pembangunan. Penyusunan RPB diuraikan dalam pedoman tersendiri.

#### **2.1.3.4 Kebijakan Administratif**

Kebijakan administratif adalah kebijakan pendukung kebijakan teknis yang akan diterapkan untuk mengurangi potensi jumlah masyarakat terpapar dan mengurangi potensi aset yang mungkin hilang akibat kejadian bencana pada suatu kawasan. Kebijakan administratif lebih mengacu kepada pembangunan kapasitas daerah secara umum dan terfokus kepada pembangunan perangkat daerah untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk setiap bencana yang ada di daerah tersebut.

Kebijakan administratif disusun berdasarkan hasil kajian ketahanan daerah pada saat penentuan tingkat ketahanan daerah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penentuan tingkat ketahanan daerah dilaksanakan berdasarkan indikator HFA. Dalam prosesnya, penentuan tingkat ketahanan daerah ini juga menghasilkan tindakan prioritas yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada lingkup kawasan kajian. Tindakan-tindakan prioritas yang teridentifikasi menjadi dasar penyusunan kebijakan yang bersifat administratif. Komponen kebijakan yang bersifat administratif adalah : peraturan dan kelembagaan; pengkajian risiko dan sistem peringatan dini; pelatihan, pendidikan dan keterampilan; pengurangan faktor risiko dasar; dan sistem kesiapsiagaan pemerintah.

Transformasi tindakan prioritas hasil kajian tingkat ketahanan daerah menjadi kebijakan administratif membutuhkan beberapa proses. Proses ini membutuhkan masukan dari berbagai pemangku kebijakan terkait.

### **2.1.3.5 Kebijakan Teknis**

Kebijakan yang bersifat teknis juga dapat diperoleh berdasarkan kajian dan peta risiko bencana. Komponen kebijakan yang bersifat teknis dan harus dipertimbangkan untuk setiap bencana pada level terendah pemerintahan lingkup kajian adalah : pencegahan dan mitigasi bencana; kesiapsiagaan bencana; tanggap darurat bencana; dan pemulihan bencana.

Penyusunan kebijakan teknis harus memperhatikan peta risiko yang telah disusun. Peta risiko bencana mampu memperlihatkan tingkat risiko di setiap daerah pemerintahan terendah yang dikaji. Sama halnya dengan penyusunan kebijakan yang bersifat administratif, kebijakan teknis disusun dengan berdiskusi dan berkonsultasi dengan para pemangku kebijakan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana

### **2.1.4 Tugas dan Fungsi TNI AL**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang bertugas mengamankan dan menjaga kedaulatan negara. Dengan visi “Terwujudnya Pertahanan Negara Yang Tangguh” dan misi “menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa. Selajutnya TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

#### **2.1.4.1 Fungsi**

- a. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;
  - a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat a huruf a) ; dan

- c) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat “a” , TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

#### **2.1.4.2 Tugas**

- a. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- b. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat “a” dilakukan dengan:
  - a) Operasi militer untuk perang; dan
  - b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    - (a) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
    - (b) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
    - (c) Mengatasi aksi terorisme;
    - (d) Mengamankan wilayah perbatasan;
    - (e) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
    - (f) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
    - (g) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
    - (h) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
    - (i) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
    - (j) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;

- (k) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
  - (l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
  - (m) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
  - (n) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat “b” dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

## 2.2 Pendekatan Teori Yang Digunakan

Pendekatan teori yang digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Warfield (*dalam* Khan, 2008 :46)<sup>15</sup> bahwa penanggulangan bencana untuk mencapai pemulihan yang cepat dan efektif dapat dilakukan oleh Angkatan Laut melalui fase-fase tersebut adalah :

- a. Mitigasi - Meminimalkan efek bencana;
- b. Kesiapan - Perencanaan bagaimana merespon;
- c. Respon - Upaya untuk meminimalkan bahaya yang diciptakan oleh bencana; dan
- d. Pemulihan - Mengembalikan masyarakat normal.

Jika merujuk pada Etzioni bahwa keefektifan lebih menekankan pada kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan yang akan dicapai, maka berdasarkan konsep efektifitas, fase tersebut efektif jika kebijakan pelibatan personel TNI AL pada penanggulangan bencana gempa di provinsi Sumatera Barat dilakukan.

---

<sup>15</sup> Khan, Himayatullah at.al. 2008. Disaster Management Cycle – A Theoretical Approach. <[www.mnmk.ro/documents/2008/2008-6.pdf](http://www.mnmk.ro/documents/2008/2008-6.pdf)>

Selanjutnya Dusseldorp (*dalam* Sunarti. 2012:2)<sup>16</sup> menjelaskan bagaimana proses partisipasi dalam hal ini adalah partisipasi TNI AL : Menyangkut bagaimana Tingkat Keterlibatan TNI AL, Cara Keterlibatan TNI AL, Keterlibatan dalam berbagai tahap proses tanggap darurat. Partisipasi dimaksud adalah dalam hal logistik. BNPB mengartikan logistik sendiri sebagai sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Logistik yang dijabarkan Setiawan (2010) berkaitan dengan proses perencanaan, penerapan, dan pengawasan/ pengendalian pengaliran maupun penyimpanan berbagai barang dan material maupun informasi yang efektif maupun efisien dari sisi biaya, dari titik asal hingga sampai ke titik penggunaan (oleh para korban bencana), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna tersebut. Dalam hal ini bagaimana keterlibatan TNI AL pada :

- a. Bagaimana partisipasi TNI AL dalam penentuan lokasi pusat distribusi bantuan maupun lokasi pengungsian sementara;
- b. Bagaimana partisipasi TNI AL dalam penentuan skema alokasi bantuan (baik berupa barang maupun tenaga medis/paramedis) secara efektif dan efisien;
- c. Bagaimana partisipasi TNI AL dalam perancangan jaringan distribusi bantuan yang mampu meningkatkan kinerja pemberian bantuan di masa mendatang;
- d. Bagaimana partisipasi TNI AL dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari berlangsungnya tiga aktivitas pertama

### **2.3 Kerangka Pikir Penelitian**

Indonesia yang terkenal akan kesuburan tanah serta kekayaan kandungan mineralnya yang berlimpah, juga memiliki banyak resiko

---

<sup>16</sup> Sunarti, Euis. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/03/Dr.-Euis-Sunarti-Partisipasi-Masyarakat-dalam-Pembangunan-Masyarakat.pdf>.

alamiah. Pertemuan dua lempeng tektonik Eurasia dan Australasia yang senantiasa bergesekan, mengakibatkan terjadinya banyak gempa, gunung meletus, dan bencana alam lainnya yang mengancam keselamatan kehidupan manusia. Selain kedua lempeng tektonik tersebut, Indonesia juga menjadi tempat bertemunya dua sabuk pegunungan berapi, *Mediterranean* dan *Pacific belt*. Dalam perspektif pertahanan negara, bencana alam digolongkan sebagai ancaman nonmiliter.

Sesuai Pasal 7 ayat (3) UU no.2 tahun 2002 tentang pertahanan negara, lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan diamanatkan menjadi unsur utama pertahanan terhadap ancaman non militer dibantu oleh semua komponen negara. Karenanya, penanggulangan bencana alam menjadi tugas dan tanggungjawab kementerian-kementerian non pertahanan untuk mengkoordinir dan mengerahkan kekuatan yang ada sesegera mungkin ke lokasi bencana.

Saat terjadi bencana, dibutuhkan kapal-kapal dalam jumlah yang cukup besar untuk mengangkut bantuan ke wilayah yang bencana. Fasilitas gudang di pelabuhan-pelabuhan laut digunakan untuk menampung bantuan dari dalam dan luar negeri sebelum diangkut ke dalam kapal. Industri perikanan yang kuat dimanfaatkan sebagai sumber pendukung logistik, transport dan tenaga manusia yang dapat dengan cepat diarahkan ke lokasi bencana. Pertambangan minyak lepas pantai terdekat dengan lokasi bencana dapat dimanfaatkan untuk mengoperasikan helikopternya guna melakukan tindakan bantuan awal sekaligus menjadi *on-scene coordinator*. Bahkan, industri pariwisata maritim dapat dijadikan *early warning* jika tanda-tanda bencana tsunami muncul. Potensi-potensi industri jasa maritim (Potinjasmart) ini perlu untuk dipersiapkan dan dibina dengan baik jauh sebelum bencana terjadi agar dapat terjalin koordinasi yang baik dilandasi kesepahaman yang dituangkan dalam suatu *standard operating prosedur*.

Di dalam tulisan ini membahas tentang gambaran dan penjelasan, bagaimana peran dan partisipasi TNI AL dapat berperan proaktif dalam penanggulangan bencana alam melalui pemanfaatan Injasmar jauh sebelum terjadinya bencana. Peran ini didasari kesadaran bahwa penanganan bencana alam yang melibatkan seluruh komponen bangsa tidak dapat serta merta dilaksanakan pada saat bencana terjadi, melainkan harus dibina jauh sebelumnya. Peran tersebut perlu untuk mengaktualisasikan TNI AL dalam rangka fungsi pertahanan negara terhadap ancaman nonmiliter. Sebagaimana pendekatan teori dari BNPB mengartikan logistik sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Sedangkan logistik penjelasan Setiawan (2010) bagaimana peran dan partisipasi TNI AL dalam proses perencanaan, penerapan, dan pengawasan/ pengendalian pengaliran maupun penyimpanan berbagai barang dan material maupun informasi yang efektif maupun efisien dari sisi biaya, dari titik asal hingga sampai ke titik penggunaan (oleh para korban bencana), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alur pikir berikut :



**Bagan Alur Pikir**

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian Kualitatif**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Moleong (2005) dalam Mustafa<sup>17</sup> menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara umum penelitian dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam menjelaskan suatu fenomena.

Kemudian menurut Herdiansyah (2010:9)<sup>18</sup> juga menjelaskan penelitian kualitatif berikut ini:

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan dua tokoh tersebut, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Alasan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif tidak lain karena fokus masalah yang dikaji membutuhkan jawaban yang mendalam. Oleh karena itu perlu dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk mengungkapkan sejauh mana partisipasi keterlibatan TNI AL dalam penanggulangan gempa dan tsunami di Sumatera Barat. Dengan kualitatif deskriptif penulis dapat memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

---

<sup>17</sup> Mustafa. Zaenal. 2002. Dalam "Metodologi Penelitian". Tidak dipublikasikan.

<sup>18</sup> Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : salemba Humanika.

dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif<sup>19</sup>.

### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah TNI Angkatan Laut yang bertugas melakukan penanggulangan bencana gempa di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan objek penelitian adalah : Peran dan partisipasi personel TNI AL pada saat tanggap darurat penanggulangan bencana gempa Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam pendistribusian logistik.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang dikumpulkan terdiri dari jenis data sekunder dan data primer. Pertama, untuk jenis data sekunder adalah data yang sudah dikelola oleh pihak lain dan digunakan dalam penelitian ini sebagai pendukung dan pelengkap informasi yang dibutuhkan. Sumber data sekunder adalah :

- a. Arsip-arsip, dokumen, Undang-Undang, buku-buku yang berkaitan dengan tugas TNI Angkatan Laut dalam menanggulangi bencana gempa.
- b. Laporan BNPB mengenai penanggulangan bencana gempa bumi tanggal 30 September 2009 dan gempa Mentawai tanggal 25 Oktober 2010.
- c. Profil dan monografi Provinsi Sumatera Barat untuk data gambaran lokasi penelitian.

Kedua, jenis data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung<sup>20</sup> melalui teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam dengan informan penelitian serta diskusi dengan para pihak yang menangani penanggulangan bencana di Provinsi

---

<sup>19</sup>Sugiyono.(2010). Tentang *Metode Penelitian Kombinasi*.Bandung .Alphabeta.

<sup>20</sup> Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain. Baca CL.selltiz.et al. "*Research Method in Social Relations*", 1964.Hal 200.

Sumatera Barat untuk mendapatkan temuan untuk menentukan seberapa efektif keterlibatan, kendala serta upaya-upaya yang pernah dilakukan TNI AL dalam penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Sumatera Barat.

### **3.4 Desain Penelitian**

#### **3.4.1 Teknik Penentuan Informan Penelitian**

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan *Snowbal Sampling*. Teknik ini digunakan karena penulis akan mencari informasi kepada informan-informan selanjutnya seperti bola salju, mengalir dan berhenti pada informan kunci, yakni informan yang menguasai dan paham apa yang menjadi kajian penulis. Untuk menemukan informan kunci, penulis akan memperoleh keterangan dari informan pembuka, lewat informan pembuka inilah penulis dapat mengetahui siapa informan kunci yang tepat.

Adapun kriteria informan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. TNI AL yang bertugas menanggulangi bencana gempa di Sumatera Barat
- b. Tokoh masyarakat untuk mengetahui tanggapannya atas kinerja TNI AL di Sumatera Barat, dan anggota masyarakat yang pernah mengalami bencana dan pernah mendapat bantuan TNI AL pada saat bencana di Sumatera Barat.
- c. Institusi lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana gempa di Sumatera Barat.

#### **3.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Pemilihan teknik ini tidak lain karena teknik observasi dan teknik wawancara merupakan cara yang penulis pilih agar dapat menjawab fokus permasalahan. Lewat observasi penulis dapat melihat dan mengamati secara langsung bagaimana subjek objek penelitian.

Sedangkan teknik wawancara penulis menggunakan teknik wawancara, digunakan agar penulis bisa bertanya langsung dengan subjek penelitian berkaitan dengan objek yang dikaji. Adapun hal-hal yang diobservasi adalah : latar atau seting lokasi penelitian; dan situasi dan kondisi aktivitas informan penelitian di lapangan.

Sedangkan hal-hal pokok yang akan digali dalam wawancara adalah hal-hal pokok yang nantinya akan diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan di panduan wawancara. Adapun hal-hal pokok yang digali informasinya berkaitan dengan :

- a. Tugas dan fungsi TNI AL dalam menanggulangi bencana gempa di Sumatera Barat.
- b. Gerakan/model/strategi yang sudah di laksanakan oleh TNI AL dalam menanggulangi bencana gempa di Sumatera Barat.
- c. Sistem dan pola kerja dalam menanggulangi bencana gempa di Sumatera Barat.
- d. Jaringan kerjasama TNI AL dalam menanggulangi bencana gempa di Sumatera Barat.
- e. Kendala TNI AL dalam menanggulangi bencana gempa di Sumatera Barat.
- f. Upaya mengatasi kendala dalam menanggulangi bencana gempa di Sumatera Barat.

### **3.4.3 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif deskriptif. Analisis data dilakukan sejak turun ke lapangan, setiap data yang terkumpul melalui hasil wawancara dan observasi sedikit demi sedikit dicatat, dipilah-pilah sesuai dengan fokus masalah, diberi kode-kode, dianalisis, apabila ada kekurangan penulis akan merichek data dan menanyakan kembali kepada informan yang mengetahui untuk langsung dianalisis, setelah selesai barulah penulis

membuat tulisan tesis dengan sistematis sampai dengan menarik kesimpulan secara holistik.

#### **3.4.4 Validitas dan Reliabilitas**

Validitas dan reliabilitas sebenarnya adalah istilah untuk metode kuantitatif, sedangkan dalam penelitian kualitatif lebih dikenal autentifikasi, konformabilitas, kredibilitas, transferabilitas. Namun lebih mengakar di tengah kalangan akademik istilah validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu penulis menggunakan istilah keakuratan dan keabsahan data. Keakuratan dan keabsahan data merupakan syarat mutlak untuk menguji kebenaran dan kejujuran sebuah deskripsi, kesimpulan, penjelasan, tafsiran, dan isi laporan secara keseluruhan. Validitas dan realibilitas menyangkut kesesuaian data/uraian yang dikemukakan penulis sesuai dengan kondisi subjek dan objek yang sebenarnya.

Keakuratan dan keabsahan data dilakukan dengan cara berikut ini:

- a. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dari informan penelitian, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa yang dikatakan informan secara pribadi dengan penulis.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen terkait yang diperoleh baik dari TNI AL dan masyarakat yang berhubungan dengan proses gempa saat terjadi Sumatera Barat.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif informan dengan masyarakat lain, pemerintah Sumatera Barat dan pihak TNI AL yang bertugas saat gempa di Sumatera Barat.

Cara-cara tersebut untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber, dan dari sumber yang berbeda sejak pengumpulan data, untuk mendapatkan informasi tentang pelibatan TNI AL dalam penanggulangan bencana gempa dan tsunami Sumatera Barat.

### **3.5 Prosedur Penelitian**

#### **3.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya dilokasi-lokasi yang terkena dampak gempa yang pernah terjadi dan mendapat bantuan para TNI AL. Alasan pemilihan lokasi, dikarenakan lokasi penelitian pernah mengalami bencana gempa yang cukup parah dan banyak tim yang diperbantukan untuk menangani bencana tersebut, salah satunya adalah TNI AL yang diterjunkan saat bencana di Sumatera Barat. Oleh karena itu penulis memilih lokasi di Sumatera Barat.

#### **3.5.2 Waktu dan Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bulan April - Agustus 2013.

## **BAB 4**

### **ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Sebaran Data/Subjek Penelitian**

Gambaran sebaran data atau subjek penelitian ini akan membahas tentang kondisi sosial geografis Sumatera Barat yang berpotensi gempa dan tsunami, kepadatan dan persebaran penduduk kota Sumatera Barat serta karakteristik subjek penelitian.

##### **4.1.1 Kondisi Sosial Geografis Sumatera Barat**

Berdasarkan data profil daerah Sumatera Barat tahun 2006<sup>21</sup> disebutkan bahwa, Sumatera Barat yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera mempunyai letak geografis yang strategis antara kawasan sebelah utara dan kawasan timur pulau Sumatera dengan pulau Jawa di sebelah selatan. Provinsi ini mempunyai luas 42.229,73 Km<sup>2</sup> dengan topografi mulai dari datar, bergelombang sampai bergunung yang merupakan bagian dari jajaran pegunungan Bukit Barisan.

Mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah suku Minangkabau yang beragama Islam. Jumlah penduduk di Provinsi ini pada tahun 2005 mencapai 4,603.988 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak 90.1 ribu orang dari penduduk laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk meningkat 0.71 persen per tahun. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) perkapita penduduk pada tahun 2005 tercatat sebesar Rp. 9,72 juta.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia jumlah pencari kerja lebih besar bila dibandingkan dengan lowongan kerja yang tersedia. Hal ini

---

<sup>21</sup> <http://www.bappeda.SumateraBarat.go.id/?mod=konten&id=5>

mengakibatkan angka pengangguran cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja Sumatera Barat pada tahun 2005 adalah 62.53 %.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2005 yang dipunyai Provinsi ini adalah Rp. 448.279.018.625 (empat ratus empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang merupakan 60,13 % dari APBD Sumatera Barat (Rp.745.548.637.605).

Jumlah total ekspor yang diperoleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2005 adalah US\$ 685.76 juta dengan perincian dari sektor pertanian mencapai US\$ 6.01 juta; dari sektor industri US\$ 664,36 juta, dan pertambangan US\$ 15.72 juta.

Provinsi Sumatera Barat<sup>22</sup> menurut kedudukan geografis terletak antara 0°54' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur dengan luas total wilayah sekitar 42.297,30 Km<sup>2</sup> (4.297.300 ha), termasuk 375 buah pulau besar dan kecil. Secara administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 (sembilan belas) Kabupaten dan Kota yaitu : Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat (Pemekaran dari Kabupaten Pasaman), Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya ( Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung), Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan (Pemekaran Kabupaten Solok), Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman.

---

<sup>22</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Kota\\_Sumatera Barat](http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Kota_Sumatera_Barat)

#### 4.1.2 Kondisi Sosial Geografis Kota Padang

Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, letak Kota Padang sangatlah strategis. Begitu strategisnya letak Kota Padang ini telah menjadikan sebagai pusat kegiatan nasional, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Berdasarkan PP No 17 tahun 1980 luas wilayah Kota Padang adalah 694,96 Km<sup>2</sup> atau 1,65 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Menurut Perda No. 10 Tahun 2005 tentang luas Kota Padang bertambah menjadi 1.414,96 km<sup>2</sup>, karena adanya penambahan wilayah lautan/perairan seluas 720,00 km<sup>2</sup>. Secara geografis, Kota Padang berada di antara 0° 44' 00" dan 1° 08' 35" Lintang Selatan serta antara 100° 05' 05" dan 100° 34' 09" Bujur Timur. Dari sisi administrasi, Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan.

Pada awalnya luas Kota Padang adalah 33 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 13 buah Kampung, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan dan Padang Timur. Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 wilayah Kota Padang menjadi 694,96 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan. Dengan dicanangkannya pelaksanaan otonomi daerah sejak Tanggal 1 Januari 2001, maka wilayah administratif Kota Padang dibagi dalam 11 Kecamatan dan 103 Kelurahan. Dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi Kelurahan maka jumlah Kelurahan di Kota Padang menjadi 104 Kelurahan.

Batas-batas wilayah Kota Padang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Solok; dan
- d. Sebelah Barat : Samudera Hindia.

Kota Padang yang membujur dari Utara ke Selatan memiliki pantai sepanjang 68,126 km dan deretan Bukit Barisan. Perpaduan kedua letak tersebut menjadikan Kota Padang memiliki alam yang sangat indah dan menarik.

Di samping memiliki wilayah daratan, Kota Padang juga memiliki wilayah perairan yang dihiasi oleh 19 pulau-pulau kecil yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Padang. Kesembilan belas pulau tersebut tersebar pada beberapa Kecamatan di Kota Padang.

Selanjutnya, berdasarkan peruntukkannya, tanah di Kota Padang dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Peruntukkan Tanah di Kota Padang**

No	Jenis peruntukkan	Luas	%	Keterangan
1	Tanah Pribadi	8370,62	12 %	Perumahan, Perusahaan Industri, Jasa
2	Pertanian dan perkebunan	23495,96	33,9 %	Sawah, Ladang, Perkebunan Peternakan, kolam Danau buatan
3	Hutan	37373,93	53,9 %	Hutan mangrove, Hutan lebat, Semak Sungai, dll
4	Jalan	135	0,2 %	Jalan arteri, Jalan kolektor
	Total	<b>69375.51</b>	100 %	

*Sumber : Kota Sumatera Barat dalam Angka 2009<sup>23</sup>*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara peruntukkan luas tanah yang ada di Kota Padang masih didominasi oleh hutan dan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tersedia peluang untuk melakukan pergeseran penduduk ketempat-tempat yang lain, sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk pada satu titik tertentu saja. Secara jelas dapat dilihat pada tabel di atas dari komposisi penggunaan lahan yang di kota

<sup>23</sup> Profil Daerah Sumatera Barat, Tahun 2006. Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat. 2006. <http://dda88.blogspot.com/2011/03/sumatera-barat.html>

Padang juga dapat dilihat bahwa pertanian dan perkebunan juga masih menjadi salah satu sektor ekonomi utama bagi masyarakat Kota Padang. Meskipun lokasi pertanian tersebut jauh dari pemukiman masyarakat.

Secara umum Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kelurahan sebanyak 104. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Kecamatan di Kota Padang**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Bungus Teluk Kabung	Pasar Laban	6
2	Lubuk Kilangan	Bandar Buat	7
3	Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	15
4	Padang Selatan	Mata Air	12
5	Padang Timur	Simpang Haru	10
6	Padang Barat	Purus	10
7	Padang Utara	Lolong Belanti	7
8	Nanggalo	Surau Gadang	6
9	Kuranji	Pasar ambacang	9
10	Pauh	Pasar Baru	9
11	Koto Tangah	Lubuk Buaya	13
	Kota Sumatera Barat		104

*Sumber : Sumatera Barat dalam Angka 2009*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada 4 kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Padang Selatan, dan Kecamatan Padang Timur. Sedangkan populasi penduduk berdasarkan kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

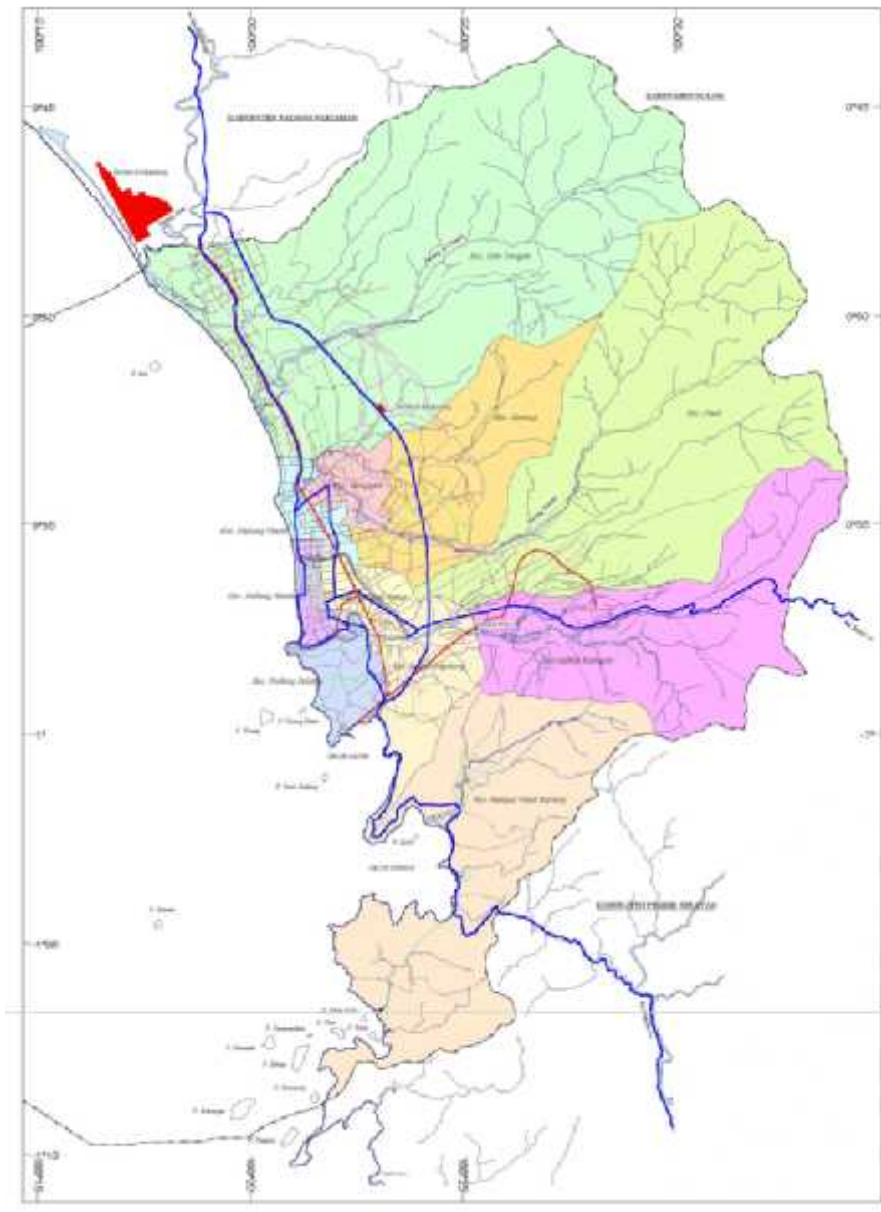
**Tabel 4.3**  
**Populasi Penduduk Berdasarkan Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas Daerah Km <sup>2</sup>	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Km <sup>2</sup>	Persentase (%)
1	Bungus Teluk Kabung	100.78	24,417	242	2,79
2	Lubuk Kilangan	85.99	44,552	518	5,09
3	Lubuk Begalung	30.91	109,793	3,552	12,54
4	Padang Selatan	10.03	64, 458	6,427	7,36
5	Padang Timur	8.15	88,510	10,860	10,11
6	Padang Barat	7.00	62,010	8,859	7,08
7	Padang Utara	8.08	77,509	9,593	8,85
8	Nanggalo	8.07	59,851	7,416	6,83
9	Kuranji	57.41	123,771	2,156	14,13
10	Pauh	146.29	54,846	375	6,26
11	Koto Tangah	232.25	166,033	715	18,96
	<b>Total</b>		<b>875,750</b>		<b>100</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang*

Tabel di atas menunjukkan bahwa Koto Tangah adalah Kecamatan dengan populasi penduduk tertinggi di Kota Padang yaitu 166,033 jiwa selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Kuranji dan Lubuk Begalung. Namun jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya ketiga Kecamatan dengan populasi terbesar tersebut tidaklah terlalu padat, hal ini terjadi karena luasan area ketiga Kecamatan tersebut cukup luas. Jika dilihat dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi itu adalah Kecamatan Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo. Kepadatan penduduk pada beberapa Kecamatan tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan-Kecamatan tersebut merupakan pusat perekonomian di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sehingga populasi penduduk berkumpul di Kecamatan-Kecamatan tersebut. Hal ini menarik jika dihubungkan dengan karakteristik masyarakat Minangkabau yang sangat lincah dan tidak bisa dilepaskan dari perdagangan, maka sangat wajar kiranya jika komposisi penduduk yang ada di Kota Padang terpusat pada

tempat-tempat yang dekat dengan keramaian dan pusat perdagangan. Selain itu, selain merupakan Kecamatan-Kecamatan dengan populasi penduduk paling tinggi, Kecamatan-Kecamatan tersebut secara geografis juga terletak di pusat kawasan pesisir yang ada di Kota Padang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran peta di bawah ini :



**Gambar Peta Kota Padang**

Kecamatan Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara dan kecamatan Nanggalo, selain merupakan kecamatan-kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi di Kota Padang, jika dilihat

letaknya juga merupakan kecamatan-kecamatan yang paling rawan bencana karena letaknya yang berada di pesisir pantai Padang. Sehingga jika terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami maka kawasan kecamatan-kecamatan tersebut akan menerima dampak yang paling parah jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

#### **4.1.3 Profil 4 Kecamatan dengan Populasi Penduduk Terpadat di Kota Padang**

##### **4.1.3.1 Kecamatan Padang Selatan**

Secara geografis letak Kecamatan Padang selatan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
- c. Sebelah Barat : Samudera Indonesia; dan
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Lubuk Begalung.

Kecamatan Padang selatan adalah salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan samudera hindia. Luas kecamatan ini 10,03 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 64.458 jiwa pada tahun 2009 hal ini setara dengan 6.427 jiwa/km<sup>2</sup> meskipun berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, namun wilayah Kecamatan Padang Selatan ini terlindung oleh kawasan hutan bakau. Berdasarkan peruntukkannya, penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Padang Selatan dapat dibagi menjadi beberapa hal yaitu ;

**Tabel 4.4**  
**Penggunaan Lahan di Kecamatan Padang Selatan**

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Perkebunan	241
2	Hutan rakyat	191
3	Pekarangan	167
4	Rumah, bangunan dan halaman sekitarnya	163
5	Kebun/Tegal	105
6	Ladang/Huma	84
7	Sementara tidak diusahakan	40
8	Sawah	10
9	Sumatera Barat rumput	2

*Sumber: www.padang.go.id Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya*

Berdasarkan Peta Citra Satelit yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat bahwa meskipun berbatasan langsung dengan kawasan samudera Indonesia, namun secara geografis kawasan Kecamatan Padang Selatan ini terlindungi oleh bentang alam. Selain memiliki hutan yang rapat dikawasan pesisirnya, Kecamatan ini juga terlindung oleh perbukitan yang menjadi benteng alam di sekitar pesisir pantainya. Sehingga jika terjadi tsunami kawasan kecamatan ini tidak relatif lebih terlindung jika dibandingkan kecamatan lainnya.

#### **4.1.3.2 Kecamatan Padang Utara**

- a. Secara geografis Kecamatan Padang utara ini berbatasan dengan beberapa kawasan yaitu :
- b. Sebelah Utara : Kecamatan Koto Tengah;
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Padang Barat;
- d. Sebelah Barat : Samudera Indonesia; dan
- e. Sebelah Timur : Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Barat.

Kawasan Kecamatan Padang Utara ini adalah kawasan yang letaknya langsung berbatasan dengan kawasan Samudera Indonesia. Jika dilihat

dari jenis penggunaan lahannya maka, luas lahan terbesar dipergunakan di Kecamatan Padang Utara ini adalah untuk pemukiman atau bangunan dan halaman yaitu mencapai 481 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel penggunaan lahan di bawah ini :

**Tabel 4.5**  
**Penggunaan Lahan di Kecamatan Padang Utara**

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Bangunan dan halaman	481
2	Pekarangan	210
3	Sementara tidak diusahakan	43
4	Lain-lain	36
5	Sawah	15
6	Kebun/Ladang/Huma	12
7	Empang dan Sumatera Barat rumput	6
8	Hutan rakyat	5

**Sumber: Manajemen bencana <http://www.un.or.id/id/apa-yang-kami-lakukan/kemitraan-pembangunan/manajemen-bencana>**

Dengan luas Kecamatan mencapai 8,08 Km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk yang mencapai 77,509 atau dengan kepadatan penduduk yang setara dengan 9.593 jiwa per Km<sup>2</sup> menjadikan Kecamatan ini sebagai salah satu Kecamatan terpadat di Kota Padang.

Jika merujuk pada Peta Citra Satelit yang dikeluarkan oleh BNPB maka diketahui bahwa populasi penduduk cukup padat pada bagian barat Kecamatan. Terutama di kawasan Ulak Karang Utara dan kawasan Air Tawar Barat. Di dua kawasan tersebut terdapat hotel dan rumah sakit. Di Kecamatan ini juga terdapat 2 sekolah menengah yaitu SMAN 1 Padang dan SMPN 25 Padang. Kawasan Kecamatan Padang Utara ini, jika dilihat dari peta dapat disebut sebagai kawasan rawan bencana, selain karena tempatnya yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, juga karena tidak adanya penghalang yang menghalangi air laut untuk masuk. Selain itu, lokasi Kecamatan ini juga sejajar dengan

kawasan Samudera Indonesia tersebut, sehingga jika terjadi tsunami intrusi air laut sangat cepat menghatam bangunan-bangunan yang padat berdiri di sepanjang bibir pantai di Kecamatan Padang Utara ini. Selain itu, kawasan Kecamatan Padang Utara ini juga berbatasan langsung dengan muara sungai yang mengarah ke laut, hal ini juga menjadi ancaman yang serius jika terjadi bencana karena dari pengamatan citra satelit juga terlihat bahwa kawasan muara sungai ini juga menjadi salah satu kawasan yang berpenduduk cukup padat.

#### **4.1.3.3 Kecamatan Padang Barat**

Secara geografis Kecamatan Padang Barat adalah kecamatan yang berbatasan dengan beberapa wilayah di antaranya adalah:

- a. Sebelah Utara : Padang Utara
- b. Sebelah Selatan : Padang Selatan
- c. Sebelah Barat : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur : Padang Timur

Kecamatan Padang Barat adalah salah satu kawasan Kecamatan yang secara administratif sangat penting. Hal ini karena di Kecamatan Padang Barat inilah terletak kantor Gubernur Sumatera Barat dan kantor Walikota Padang. Dari seluruh Kecamatan yang ada di Kota Padang pun kecamatan Padang Barat merupakan kecamatan terkecil dengan luas 7 Km<sup>2</sup>. Namun jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, kecamatan Padang Barat menduduki peringkat ke 3 Kecamatan terpadat di Kota Padang dengan 8.859 jiwa per Km<sup>2</sup>nya.

Jika dilihat dari letaknya yang memanjang dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, dan dengan tingkat kepadatan penduduk yang terbesar ke 3 di seluruh Kota Padang, menjadikan kawasan ini sangat rentan terhadap bencana baik gempa bumi maupun tsunami.

Jika dilihat dari Peta Citra Satelit BNPB, diketahui pula Kecamatan Padang Barat ini diapit oleh dua buah sungai yang cukup besar. Dengan posisi penduduk terpadat terletak pada bagian barat Kecamatan dan juga pada bagian selatan Kecamatan Padang Barat. Di mana pada kedua bagian tersebut terletak beberapa hotel dan pemukiman yang padat penduduknya.

#### **4.1.3.4 Kecamatan Padang Timur**

Secara geografis, Kecamatan Padang Timur adalah Kecamatan yang berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Padang Utaran dan Kuranji
- b. Sebelah selatan : Kecamatan Padang Selatan dan Lubuk Begalung
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Padang Barat
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Pauh

Meskipun tidak berbatasan langsung dengan kawasan pesisir pantai Sumatera Barat. Namun Kecamatan Padang timur menjadi penting artinya dalam kaitannya dengan bencana terutama gempa bumi. Hal ini karena Kecamatan Padang Timur merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Padang yaitu dengan 10.860 jiwa per Km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk 88.510 jiwa. Jika dilihat dari jenis penggunaan lahan, penggunaan lahan di Kecamatan Padang Timur yang paling besar adalah digunakan untuk pekarangan dan pemukiman yaitu 664 Ha, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.6**  
**Penggunaan Lahan di Kecamatan Padang Timur**

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Pekarangan	664
2	Sawah	104
3	Lain-lain	36
4	Tegal/Kebun	7
5	Sementara tidak diusahakan	4

Sumber: Manajemen bencana <http://www.un.or.id/id/apa-yang-kami-lakukan/kemitraan-pembangunan/manajemen-bencana>

#### **4.1.4 Gempa Bumi dan Sumatera Barat**

##### **4.1.4.1 Sejarah Kegempaan di Sumatera Barat**

Sudah sejak lama diketahui bahwa Sumatera Barat berada diantara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Sumatera Barat juga terletak pada patahan (sesar) Semangko. Dan di dekat pertemuan lempeng benua besar tersebut pula terdapat patahan Mentawai. Ketiganya merupakan daerah seismic aktif.

Daryono (2009) menyebutkan bahwa berdasarkan catatan data sejarah kegempaan, daerah Sumatera Barat memang sudah beberapa kali mengalami gempa bumi merusak. Sejak 1822 hingga 2009, telah terjadi setidaknya 14 kali kejadian gempa bumi kuat dan merusak di Sumatera Barat dan di antaranya menyebabkan tsunami. Sejarah panjang gempa bumi merusak di Sumatera Barat, antara lain, adalah gempa bumi Sumatera Barat (1822, 1835, 1981, 1991, 2005), gempa bumi Singkarak (1943), gempa bumi Pasaman (1977), dan gempa bumi Agam (2003). Sedangkan gempa bumi yang diikuti gelombang tsunami terjadi di Mentawai (1861 dan 2010) dan Sori-Sori (1904).

Dari catatan tertua yang pernah ada menunjukkan bahwa pada tahun 1822 di Sumatera Barat telah terjadi gempa bumi kuat yang diikuti suara gemuruh yang berpusat di antara Gunung Talang dan Gunung Marapi.

Meski tidak ada laporan secara rinci, catatan tersebut menyebutkan, gempa bumi itu dilaporkan menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa cukup banyak.

Pada 28 Juni 1926, gempa bumi dahsyat 7,8 skala richter juga dilaporkan pernah mengguncang Padang Panjang. Akibat gempa bumi ini, tercatat korban tewas lebih dari 354 orang. Kerusakan parah terjadi di sekitar danau Singkarak Bukit Tinggi, danau Maninjau, Padang Panjang, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, dan Alahan Panjang. Gempa bumi susulan mengakibatkan kerusakan di sebagian wilayah danau Singkarak. Tercatat di Kabupaten Agam 472 rumah roboh, 57 orang tewas, dan 16 orang luka berat. Di Padang Panjang, 2.383 rumah roboh serta 247 orang tewas. Dampak gempa bumi juga menimbulkan banyak tanah terbelah, longsor di Padang Panjang, Kubu Krambil, dan Simabur.

Gempa bumi kuat dengan magnitudo 5,6 skala richter juga pernah terjadi pada 16 Februari 2004. Getaran gempa bumi ini dirasakan di sebagian besar daerah Sumatera Barat hingga pada VI MMI (Modified Mercalli Intensity) yang menimbulkan korban tewas 6 orang dan meluluhlantakkan ratusan bangunan rumah di Kabupaten Tanah Datar.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 22 Februari 2004, gempa bumi yang lebih besar kembali mengguncang Sumatera Barat dengan magnitudo 6 skala richter. Gempa bumi ini mengakibatkan satu orang tewas dan beberapa orang luka parah serta ratusan rumah rusak berat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya Daryono (2009)<sup>24</sup> juga menyebutkan mengenai tektonik Sumatera Barat. Yaitu kondisi seismik yang aktif dan kompleks zona

---

<sup>24</sup>[http://www.gitews.org/tsunami-kit/id/E4/sumber\\_lainnya/studi\\_kasus\\_30\\_Menit\\_di\\_Kota\\_Sumatera\\_Barat\\_Pembelajaran\\_untuk\\_Kesiapsiagaan\\_dan\\_Peringatan\\_Dini\\_Tsunami\\_dari\\_Gempa\\_Bumi\\_30\\_September\\_2009.pdf](http://www.gitews.org/tsunami-kit/id/E4/sumber_lainnya/studi_kasus_30_Menit_di_Kota_Sumatera_Barat_Pembelajaran_untuk_Kesiapsiagaan_dan_Peringatan_Dini_Tsunami_dari_Gempa_Bumi_30_September_2009.pdf)

gempa bumi Sumatera Barat tersusun atas dua generator gempa bumi. Pertama, pembangkit gempa bumi berasal dari kawasan barat Sumatera yaitu zone subduksi lempeng yang berpotensi menimbulkan gempa kuat yang sangat mungkin diikuti tsunami.

Sebagian besar hiposenter gempa bumi yang dipicu aktivitas penyusupan lempeng berpusat di perairan sebelah barat Sumatera. Hal ini berkaitan dengan adanya pertemuan lempeng benua di dasar laut. Untuk kawasan Sumatera Barat, potensi gempa besar justru akibat aktivitas lempeng di zona subduksi yang dicirikan dengan magnitudo yang relatif lebih besar.

Generator gempa bumi kedua adalah zona patahan Sumatera atau yang populer dikenal sebagai Semangko Fault. Semangko Fault merupakan patahan sangat aktif di daratan yang membelah pulau Sumatera menjadi dua, membentang sepanjang pegunungan Bukit Barisan, dari Teluk Semangko di Selat Sunda sampai ke wilayah Aceh di utara.

Gempa bumi berkekuatan 7,0 skala richter yang mengejutkan masyarakat Sungai Penuh pada Kamis (1/10) yang episentrumnya sekitar 160 kilometer dari Kota Padang merupakan gempa bumi akibat aktivitas patahan Semangko. Tampaknya, pelepasan energi gempa bumi utama Sumatera Barat berkekuatan 7,6 skala Richter yang dibangkitkan oleh aktivitas subduksi lempeng berdampak telah memicu aktivitas sesar di daratan.

Berdasar data sejarah gempa bumi Sumatera, dalam 100 tahun terakhir, sudah sekitar 20 gempa besar dan merusak terjadi di zona patahan ini. Berdasar penelitian, aktivitas gempa bumi di patahan Semangko rata-rata sekitar lima tahun sekali. Meski magnitudo gempa bumi di zona patahan itu relatif kecil, dampaknya bisa sangat berbahaya. Ini disebabkan sumbernya di daratan yang berdekatan dengan kawasan permukiman.

Sebagai kawasan yang sangat rawan gempa bumi, daerah Sumatera Barat akan selalu menjadi kawasan yang sering diguncang gempa bumi. Oleh karena itu, kita dituntut lebih serius dalam memperbaiki sistem penanganan bencana alam, baik dalam memperbaiki sistem pemantauan gempa bumi, pembuatan peta rawan gempa bumi, menyusun peta mikrozonasi gempa bumi, merencanakan bangunan tahan gempa bumi, maupun pendidikan masyarakat melalui sosialisasi mitigasi bahaya gempa bumi. Jatuhnya banyak korban gempa bumi sebenarnya disebabkan kurang pemahamannya masyarakat dalam menghadapi gempa bumi.

#### **4.1.4.2 Gempa Bumi Sumatera Barat 2009**

Bencana ini adalah bencana terjadi sebagai akibat terjadinya 2 gempa bumi yang terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam dan pada lokasi yang relatif berdekatan, yaitu pada hari Rabu 30 September 2009 terjadi gempa berkekuatan 7,6 pada skala richter dengan pusat gempa (episentrum) 57 km di barat daya Kota Pariaman (00,84 LS 99,65 BT) pada kedalaman (hiposentrum) 71 km. lalu terjadi lagi gempa pada hari Kamis 1 Oktober dengan kekuatan 6,8 skala richter, kali ini berpusat di 46 km tenggara Kota Sungai Penuh pada pukul 08.52 WIB dengan kedalaman 24 km. Setelah kedua gempa ini terjadi rangkaian gempa susulan yang lebih lemah. Gempa pertama terjadi pada daerah patahan Mentawai (di bawah laut) sementara gempa kedua terjadi pada patahan Semangko di daratan. Getaran gempa pertama dilaporkan terasa kuat di seluruh wilayah Sumatera Barat, terutama di pesisir.

Bencana gempa pada tahun 2009 ini menjadi salah satu bencana terbesar yang dirasakan oleh masyarakat. Efek kepanikan yang muncul karena gempa bumi ini juga sangat besar. Selain menimbulkan kepanikan yang luar biasa di masyarakat, gempa ini juga menyebabkan kerugian fisik bangunan dan jiwa yang juga tidak sedikit. Gempa yang terjadi ini akan selalu diingat oleh masyarakat Kota Padang sebagai salah satu gempa yang paling dahsyat terjadi di Kota Padang.

Gempa berkekuatan 7,5 SR ini menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut data Satkorlak PB, sedikitnya 1.195 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 Kabupaten di Sumatera Barat, korban luka berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang, korban hilang 1 orang. Sedangkan 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, dan 78.604 rumah rusak ringan.

Tingginya jumlah korban jiwa dan kerugian yang terjadi akibat gempa bumi ini terjadi selain karena adanya kepanikan luar biasa di tengah masyarakat, juga terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengantisipasi masyarakat menghadapi gempa yang besar seperti ini. Badan meteorology, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jakarta melalui Pusat Peringatan Tsunami Nasional (NTWC) hanya mengeluarkan informasi gempa bumi, tetapi kuatnya getaran menyebabkan kepanikan dan ketakutan yang sangat luas di kalangan masyarakat Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Hoppe dan Mahardiko (2010)<sup>25</sup> mengenai Temuan dan simpulan reaksi masyarakat dan akses ke informasi, pemicu evakuasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah gempa bumi yang kuat. Namun, dalam situasi ketiadaan informasi resmi, banyak orang pergi ke pantai untuk melihat apakah air laut menyusut. Karena hal itu tidak terjadi, sebagian besar mereka memutuskan untuk tidak mengungsi. Waktu yang diperlukan dari saat air mulai surut hingga kedatangan gelombang pertama hanyalah beberapa menit. Orang tidak

---

<sup>25</sup> 30 Menit di Kota Sumatera Barat: Pembelajaran untuk Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Tsunami dari Gempa Bumi 30 September 2009 [http://www.gitews.org/tsunami-kit/id/E4/sumber\\_lainnya/studi\\_kasus\\_30\\_Menit\\_di\\_Kota\\_Sumatera\\_Barat\\_Pembelajaran\\_untuk\\_Kesiapsiagaan\\_dan\\_Peringatan\\_Dini\\_Tsunami\\_dari\\_Gempa\\_Bumi\\_30\\_September\\_2009.pdf](http://www.gitews.org/tsunami-kit/id/E4/sumber_lainnya/studi_kasus_30_Menit_di_Kota_Sumatera_Barat_Pembelajaran_untuk_Kesiapsiagaan_dan_Peringatan_Dini_Tsunami_dari_Gempa_Bumi_30_September_2009.pdf)

akan memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Selanjutnya, sebagian besar masyarakat tidak menerima informasi resmi apa pun mengenai apakah ada ancaman tsunami atau tidak. Informasi utama tersebar dari mulut ke mulut dan berdasarkan kasak-kusuk. Seiring dengan waktu, terdapat berita bahwa tidak ada ancaman tsunami dan masyarakat boleh kembali ke rumah. Informasi tersebut diudarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Padang dan diumumkan oleh Walikota. Perlahan-lahan berita ini menyebar ke makin banyak orang. Penggunaan frekuensi Radio FM untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah pilihan yang tepat. Namun, karena perkiraan waktu tiba tsunami untuk Sumatera Barat sangat pendek, informasi yang diberikan 1 jam setelah getaran akan terlambat.

Selain itu, proses evakuasi terhambat oleh kemacetan lalu lintas yang parah. Masyarakat umumnya melarikan diri dengan sepeda motor dan mobil. Karena itu terjadi kemacetan lalu lintas yang parah. Banyak kecelakaan juga terjadi. Jalur evakuasi yang ditetapkan tidak cukup untuk menyalurkan massa. Warga, tampaknya, tidak mempertimbangkan evakuasi vertikal sebagai pilihan dalam penyelamatan diri. Evakuasi berlangsung hanya sebagai gerakan horisontal menjauh dari pantai dan mengarah ke daratan. Kenyataan bahwa orang-orang bergerak ke arah laut makin menciptakan kekacauan.

Ada kekurangan pemahaman mengenai sistem peringatan dini, namun orang-orang mempercayai pemerintah untuk menyediakan informasi yang akurat secara langsung setelah gempa bumi. Sebagian besar responden hanya memiliki gambaran kabur mengenai cara kerja sistem peringatan dini tsunami secara menyeluruh. Dari sudut pandang mereka, hal terpenting adalah mendapatkan informasi akurat dan resmi secepat-cepatnya. Masyarakat percaya kepada Pemerintah Daerah, khususnya Walikota. Mereka percaya bahwa pemerintah akan menyediakan informasi yang akurat secara langsung setelah gempa bumi.

Selanjutnya, meskipun gempa yang terjadi di Sumatera Barat tahun 2009 ini tidak menimbulkan tsunami, namun TNI AL tetap mengirimkan personel ke pulau-pulau terluar yang ada di sekitar Sumatera Barat khususnya Kepulauan Mentawai seperti, Sipora, Sikakap, Siberut dan pulau-pulau kecil lainnya. Pengiriman personel ini didasari oleh pengamatan mengenai gelombang laut yang meninggi, namun ternyata tidak terjadi pengaruh yang begitu besar di Kepulauan Mentawai. Justru yang terdampak sangat parah adalah wilayah Padang Alai yang mengalami longsor. Sehingga personel TNI AL akhirnya lebih difokuskan di Padang Alai untuk melakukan evakuasi dan pencarian orang hilang akibat longsor tersebut.

#### 4.1.5 Karakteristik Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah para personel TNI AL yang bertugas langsung di lapangan ketika bencana memasuki tahap darurat. Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.7**  
**Karakteristik Informan Penelitian**

No	Inisial	Jenis Kelamin	Tempat Bertugas	Pangkat
1	Anw	Laki-laki	TNI AL	Letkol Laut
2	Nur	Perempuan	TNI AL	Letkol Laut
3	Fa	Laki-laki	Kadispotmar Lantamal II	
4	Hen	Laki-laki	Basarnas	-
5	Ba	Laki-laki	Pasi Log Yonmarhanlan II	Kapten
6	NR	Laki-laki	Tokoh masyarakat	-
7	SP	Laki-laki	TNI AL	Kapten
8	AJ	Laki-laki	Kantor SAR Kelas A Sumatera Barat	
9	AH	Laki-laki	TNI AL	Mayor Laut
10	ZH	Laki-laki	Dinas Sosial Prov Sumatera Barat	
11	TGH	Laki-laki	Staf ops Mabesal	Letkol Laut
12	ARN	Laki-laki	Komandan Lantamal II tahun 2009	Laksma TNI

Berdasarkan tabel tersebut ada tujuh informan kunci sebagai subjek penelitian yang menjelaskan objek kajian menjadi fokus peneliti. Empat orang dari TNI angkatan laut yang dibutuhkan informasinya mengenai peran dan partisipasi TNI AL dalam pendistribusian logistik dan peran lainnya dalam kondisi tanggap darurat bencana. Satu orang informan dari Basarnas yang akan menjelaskan proses partisipasi TNI AL dalam penanganan bencana pada gempa bumi September 2009 di Sumatera Barat berdasarkan sudut pandang Basarnas. Selanjutnya dua orang tokoh masyarakat diperlukan keterangannya mengenai bagaimana kondisi masyarakat dengan adanya keterlibatan TNI AL dalam proses tanggap darurat tersebut. Selain juga untuk mendapatkan keterangan mengenai peran yang dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran TNI AL dalam proses tanggap darurat.

## **4.2 Analisis Data dan Interpretasi Hasil**

### **4.2.1 Kondisi Tanggap Darurat**

BNPB menjelaskan bahwa tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tahapan keadaan darurat bencana meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi ke Pemulihan.

Sementara itu, meskipun BNPB yang memiliki kewenangan dalam fungsi koordinasi sebagaimana di atur dalam UU RI No. 24 Tahun 2007 yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan untuk bencana yang terjadi di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Namun saat ini BNPB dan BPBD masih memiliki keterbatasan dalam melaksanakan *Emergency Response* sesaat setelah bencana alam terjadi. Padahal saat ini adalah saat di mana masyarakat korban bencana sangat membutuhkan bantuan

dari seluruh elemen masyarakat. Selain itu, untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan kerugian materiil, maka diperlukan sebuah perencanaan program *emergency response* yang lebih terpadu dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam yang terjadi.

TNI sebagai salah satu institusi yang memiliki keterampilan, dan juga perlengkapan selama ini hanya diperankan sebagai institusi yang bertugas membantu, sehingga upaya Emergency Respon tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Sedangkan disisi lain seharusnya TNI dapat merancang program tanggap darurat dengan memaksimalkan sumber daya prajurit, dan berbagai sarana yang dimiliki TNI, sebagai bagian dari *Civic Mission* TNI berupa program aksi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terhadap penanggulangan dampak bencana alam.

Dalam bencana tahapan penanganan bencana yang paling dahulu adalah tanggap darurat. Pada tanggap darurat ini kondisi lapangan menjadi kacau, pada saat seperti ini keahlian yang dimiliki oleh TNI AL menjadi sangat dibutuhkan. Ketika belum ada tim-tim relawan yang berdatangan, kebutuhan untuk penanganan pertama kali dilakukan oleh pemerintah dan satuan-satuan yang ada di daerah. Salah satu tim yang langsung turun langsung tersebut adalah TNI AL.

TNI AL memandang bahwa tanggap darurat adalah kondisi awal dimana bencana baru saja terjadi, segala sesuatu yang harus dilakukan serba darurat dan membutuhkan penanganan yang segera. Pada saat seperti ini tidak semua persiapan dapat segera datang, sehingga dibutuhkan suatu penanganan yang efektif untuk memberikan gambaran bagi semua pihak mengenai kondisi bencana yang terjadi.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa partisipasi TNI AL dalam penanganan bencana terutama pada saat tanggap darurat sangat tepat karena selain menyangkut manfaat baik secara kualitatif maupun

kuantitatif juga menunjukkan bahwa TNI AL dapat bekerja cepat melakukan upaya-upaya tanggap darurat. Adapun beberapa perlakuan yang diterapkan oleh TNI AL dalam upaya tanggap darurat tersebut berdasarkan wawancara dengan informan AH adalah :

Penyiapan tempat dan gudang logistik, menerima barang-barang yang dikirim ke TNI AL (Lantamal II) baik lewat laut KRI maupun lewat darat dan mendistribusikan kemasyarakatan dan warga sekitarnya sesuai perintah pimpinan. Membantu evakuasi penduduk/masyarakat, yang terkena runtuh gedung, hotel serta rumah penduduk untuk mendapatkan pertolongan pertama. Menerima bantuan dan mendirikan tenda permanen dan tenda tenda darurat (Terval) serta mendistribusikan kebutuhan logistik baik berupa makanan siap saji, air mineral, air bersih dan material lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Pada hari pertama kejadian gempa TNI AL (Lantamal II) konsolidasi dan pengecekan kondisi personel guna pendataan kondisi dan keadaan keluarga. Dalam kondisi darurat dibentuk Dansatgas Sektor Lantamal II sebagai penanggung jawab kegiatan selama keadaan darurat gempa guna mengendalikan kegiatan personel yang ada dilapangan. Menyiapkan perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan selama kegiatan tugas di lapangan guna kelancaran pendistribusian logistik. Menyiapkan personel untuk debarkasi barang-barang bantuan yang dibawa oleh KRI di Pelabuhan Teluk Bayur serta mengamankan selama pelaksanaan kegiatan.

Dalam konteks gempa bumi Sumatera Barat 2009, TNI AL sebagai salah satu institusi yang memiliki pangkalan Militer AL di Sumatera Barat, dan juga sejalan dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang memandatkan TNI AL untuk juga menjalankan misi sipil yang salah satu tugasnya adalah melakukan upaya tanggap darurat bencana. Secara cepat TNI AL menginstruksikan kepada personelnnya untuk melakukan

upaya pendataan dan penilaian mengenai gambaran terkini kondisi sosio geografis Kota Padang pasca terjadinya gempa bumi September 2009.

Setelah didapatkan gambaran mengenai kondisi sosiogeografis tersebut, Komandan Lantamal II segera menerbitkan Surat Perintah untuk melakukan pembentukan Satuan Tugas penanggulangan bencana/gempa. Beberapa tugas yang diinstruksikan untuk dilakukan segera adalah pendataan korban, tingkat kerusakan, daerah dengan kerusakan parah, membuat posko, melakukan evakuasi, melakukan pengamanan, dan yang terpenting adalah mendistribusikan logistik. Sedangkan untuk distribusi logistik, tahapan yang dilakukan oleh TNI AL mengupayakan proses distribusi yang tepat dimulai dari manajemen perencanaan, penerimaan logistik, administrasi logistik, penyiapan tempat penampungan logistik, penunjukan personel yang terlibat dalam manajemen logistik yang meliputi proses serta teknis pendistribusian kepada masyarakat, serta transportasi yang akan digunakan. Partisipasi tersebut harus diambil oleh TNI AL sebagai suatu tugas yang menjadi kewajiban bagi TNI AL karena merupakan perintah Undang-undang. Cepatnya koordinasi yang dilakukan oleh TNI AL dalam melakukan upaya tanggap darurat menunjukkan bahwa TNI AL adalah organisasi militer yang terlatih dalam semua lini nya. Hal ini terlihat dari fungsi koordinasi selama proses tanggap darurat ini berlangsung. Dalam distribusi logistik bencana ini peran yang harus diambil oleh TNI AL tidak saja hanya pada proses distribusi logistik bencana, tetapi pada peran-peran lainnya dalam manajemen distribusi.

Sebagai ilmu manajemen yang mengedepankan seni, distribusi logistik memerlukan akurasi informasi yang sangat tepat. Artinya setiap komponen penyusun dalam manajemen logistik ini menjadi satu bagian yang saling melengkapi. Terjadinya perbedaan informasi mengenai bencana justru akan berdampak serius bagi manajemen distribusi logistik. Pada saat gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat peran TNI AL

menjadi begitu mencolok karena selain mengurus masalah evakuasi, peran penting lainnya yaitu mendistribusikan logistik tersebut sampai ke lokasi yang tepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Basarnas dalam wawancara yang dilakukan terkait peran yang diambil oleh TNI AL dalam mendistribusikan logistik bencana, yaitu :

Karena pada prinsipnya koordinasi antara TNI AL telah terjalin dengan baik di bidang bencana, oleh sebab itu TNI AL telah mampu memberikan kontribusinya dalam penanggulangan bencana yang terjadi Provinsi Sumatera Barat. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh para personel TNI AL menjadi salah satu factor pendukung utama dalam partisipasinya menanggapi tanggap darurat dan pendistribusian berbagai logistik untuk penanganan bencana di Sumatera Barat pada tahun 2009. Keterlibatan TNI AL di daerah kepulauan yang rawan bencana merupakan salah satu ide cerdas dalam pendistribusian logistik. Apalagi TNI AL merupakan salah satu instansi /Lembaga Pemerintah yang telah berkompeten dalam setiap medan tugas apapun, hal ini terlihat dalam kemampuan para personel TNI AL dilapangan. Skill yang di butuhkan TNI AL dalam mendistribusikan Logistik adalah mengenai bidang manajemen kebencanaan merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kemampuan khusus di bidang bencana. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah supermarketnya bencana, hal ini menjadi tolak ukur bagi para personel TNI AL dalam menghadapi situasi apapun di bidang bencana. Sehingga terjalinnya pola tindak dan pola pikir yang sama dalam menanggulangi permasalahan bencana. Selain itu, koordinasi yang terjalin antara Basarnas dan TNI AL sangat baik. Pada setiap operasi SAR, TNI AL selalu berperan aktif dalam operasi SAR yang terjadi di Sumatera Barat itu sangat membantu suksesnya misi kemanusiaan dalam bidang pencarian dan pertolongan (SAR) dan TNI AL yang siap disetiap saat karena koordinasi yang baik. Ada. TNI AL juga ikut serta dalam memberikan

bantuan peralatan dan kendaraan yang ada pada kesatuan TNI AL untuk meringankan tugas kebencanaan.

Dalam kondisi tanggap darurat, peran lain yang juga tidak kalah pentingnya dari TNI AL adalah membuka keterisoliran suatu daerah yang tidak memungkinkan dijangkau oleh Tim tanggap darurat lainnya, karena TNI AL ditunjang dengan peralatan yang sanggup melalui segala medan yang sulit dijangkau oleh tim tanggap darurat lainnya, beberapa peralatan tersebut seperti kapal laut yang selalu siap diberangkatkan kapan saja, Helikopter yang juga selalu siap memonitor lokasi-lokasi yang terisolir dari udara sehingga memudahkan perencanaan strategi pengiriman logistik yang akan diambil sehingga tepat sasaran dan tepat waktu. Perlengkapan-perengkapan seperti yang dimiliki oleh TNI AL hanya dimiliki oleh kesatuan TNI yang lainnya atau mungkin hanya dimiliki oleh TNI AL saja.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI AL ini adalah sesuatu yang sangat tepat dan penting untuk dilakukan sebagai upaya membuka jalur masuknya bantuan logistik bagi masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi tersebut. Beberapa tipe logistik yang didistribusikan oleh TNI AL diantaranya adalah makanan, minuman, obat-obatan, pakaian dan tenda. Logistik ini adalah logistik utama karena merupakan keperluan yang sangat mendasar bagi setiap orang, sehingga logistik-logistik ini harus segera disampaikan selain untuk mengurangi resiko kepanikan, hal ini juga penting untuk disegerakan agar tidak muncul dampak yang lebih parah seperti bertambahnya korban jiwa dapat dihindari.

Membuka lokasi-lokasi bencana yang masih terisolir menjadi sangat penting dilakukan oleh TNI AL karena TNI AL adalah lembaga Negara yang memiliki kemampuan dan fasilitas yang mumpuni untuk melakukan kerja penyelamatan seperti ini. Ketika bencana gempa bumi terjadi pada

September 2009 di Sumatera Barat. TNI AL secara khusus menurunkan 2 kapal KRI yang dipergunakan untuk menangkut logistik, dan satu buah kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit terapung untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat bencana yang terjadi tersebut. Selain itu TNI AL juga mempersiapkan helikopter untuk memantau dan melihat lokasi-lokasi bencana dari udara. Hal ini dilakukan oleh TNI AL untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi kota-kota di Sumatera Barat setelah bencana terjadi, sehingga dapat menjadi gambaran tentang strategi apa yang akan digunakan dalam pendistribusian logistik bencana tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat suatu gambaran bahwa peran TNI AL dalam mendistribusikan logistik ini merupakan suatu peran yang sangat strategis. Peran TNI AL dalam distribusi logistik ini juga sangat besar karena selain pada peran distribusi TNI AL juga mempersiapkan dari awal proses distribusi tersebut, seperti bagaimana manajemen logistik, administrasi logistik, rute pengiriman dan juga lokasi yang akan membutuhkan logistik. Hal ini sangat membutuhkan keakurasian karena jika logistik tidak tepat sasaran maka akan muncul ketimpangan akan berakibat fatal. Dalam pendistribusian logistik yang baik menunjukkan bahwa keahlian, peralatan, dan koordinasi komando yang baik dan dimiliki oleh TNI AL telah menjadikan peran TNI AL dalam distribusi logistik menjadi sangat baik dan tepat.

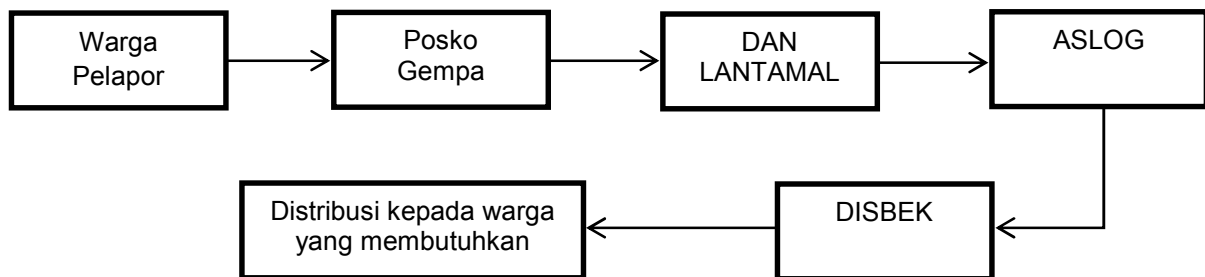
#### **4.2.2 Partisipasi Personel TNI AL Dalam Pendistribusian Logistik Pada Saat Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Gempa**

Partisipasi sebagai suatu bentuk keterlibatan mental dan keterlibatan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab di dalamnya. Partisipasi TNI AL dalam bencana terutama pada saat tanggap darurat adalah suatu keterlibatan yang merupakan kewajiban TNI AL yang diperintahkan oleh Undang-undang. Meskipun begitu, TNI AL yang ada di

Sumatera Barat secara langsung juga melakukan upaya-upaya tanggap darurat, seperti koordinasi, pendataan, dan persiapan-persiapan lokasi evakuasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan ini adalah suatu langkah antisipasi yang dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan informasi kepada tim-tim yang lain mengenai kondisi riil yang ada dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan SP diketahui bahwa :

Bentuk partisipasi TNI AL bentuk partisipasi yang dilakukan oleh TNI AL dalam tanggap darurat gempa Sumatera Barat diantaranya adalah memberikan bantuan makanan, memberikan bantuan pakaian, memberikan bantuan tenda-tenda darurat, memberikan bantuan pengobatan, memberikan bantuan baik material dan spiritual dan lain-lain.

Sedangkan untuk alur distribusi logistik sendiri hingga sampai di lokasi berdasarkan wawancara dengan informan SP ada beberapa tahap hingga proses distribusi tersebut yaitu :



**Bagan 4.1 Pendistribusian Logistik**

Partisipasi lain yang juga dilakukan oleh TNI AL pada masa tanggap darurat atau pada rentang 1-2 hari setelah bencana adalah dengan membangun tenda-tenda darurat yang diperuntukkan sebagai tenda logistik bagi masyarakat yang lokasi pembangunannya memang di fokuskan dilokasi pengungsian masyarakat. Setelah semua aktivitas tersebut dilakukan, untuk menunjukkan partisipasi penuh dari TNI AL maka Komandan Lantamal II yang ada di Sumatera Barat mengeluarkan

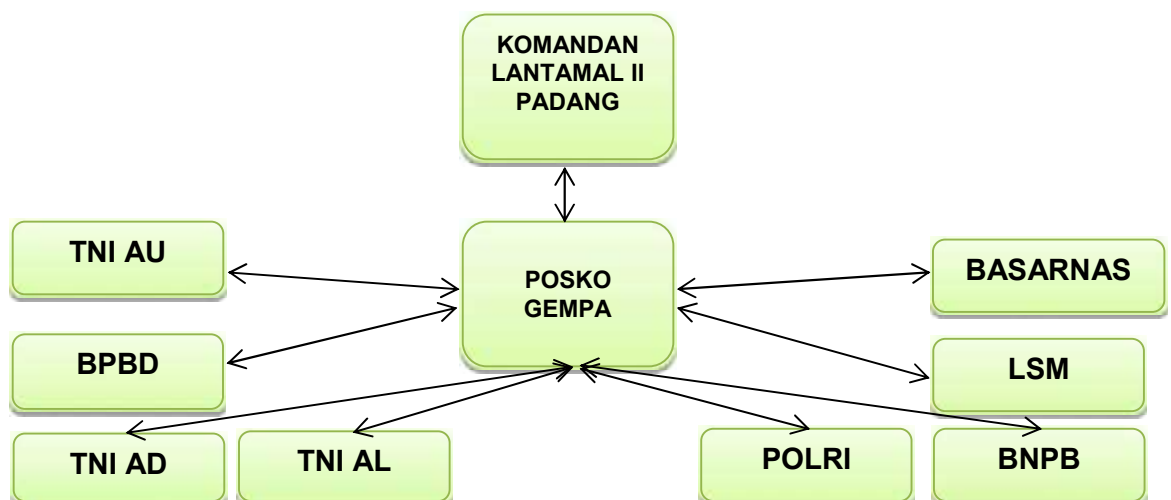
Surat Perintah untuk melakukan pengamanan dan membentuk tim khusus yang akan fokus pada distribusi logistik. Pada proses distribusi logistik ini, TNI AL mempersiapkan semua tahapan manajemen logistik ini yang diharapkan dapat membantu dan memudahkan upaya distribusi logistik tersebut.

Tujuan utama dari partisipasi TNI AL dalam tanggap darurat bencana adalah untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang dihadapi masyarakat yang diakibatkan oleh bencana, dan untuk menjawab tujuan ini maka diperlukan strategi-strategi yang akan dipergunakan dalam melakukan upaya pencegahan terhadap resiko bencana tersebut. Dan strategi *pertama* yang dilakukan oleh TNI AL adalah dengan mencegah kejadiannya, yaitu dengan sama sekali menghilangkan atau secara signifikan mengurangi kemungkinan dan peluang terjadinya fenomena yang berpotensi merugikan tersebut, akan tetapi karena bencana ini adalah bencana yang secara alami terjadi dan secara kondisional juga tidak mungkin dihindari maka strategi yang kedua yang perlu dilakukan oleh TNI AL adalah dengan melakukan berbagai cara untuk mengurangi besarnya dan keganasan kejadian tersebut dengan mengubah karakteristik ancamannya, meramalkan atau mendeteksi potensi kejadian, atau mengubah sesuai unsur-unsur struktural dan nonstruktural dari masyarakat. Jika kejadian memang tidak dapat dihindarkan atau dikurangi, maka strategi *ketiga* adalah dengan mempersiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menghindari atau merespon kejadian tersebut secara efektif sehingga kerugian dapat dikurangi. Strategi yang *keempat* adalah dengan secepatnya memulihkan masyarakat korban bencana dan membangun kembali sembari menguatkan mereka untuk menghadapi kemungkinan bencana masa depan. Jadi strategi penanganan bencana jelas-jelas bukan dan tidak terbatas pada respon kedaruratan saja.

Namun, walaupun strategi-strategi ini adalah suatu yang sangat baik, masyarakat yang terkena dampak akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui hal-hal yang bersifat teknis strategis seperti itu, oleh karena itu selain melakukan langkah-langkah strategis tersebut upaya tanggap darurat yang dilakukan pada saat bencana terjadi tersebut juga sangatlah penting dan partisipasi inilah yang dilakukan oleh TNI AL dalam rangka mengurangi resiko bertambahnya korban jiwa salah satunya. Tujuan utama penanganan seperti ini adalah untuk meringankan penderitaan korban, kerusakan ketika terjadi bencana, dan segera mempercepat pemulihan.

Peran personel TNI AL dalam pendistribusian logistik ini menjadi sangat penting. Berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa ada beberapa hal yang membuat peran TNI AL dalam pendistribusian ini sangat penting yaitu :

- a. TNI AL adalah institusi yang memiliki garis komando yang sangat jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SP garis komando ini merupakan suatu prosedur standar yang dimiliki oleh TNI AL dimana jika dirangkaikan maka garis komando tersebut akan menjadi suatu bagan mengenai suatu alur perintah yang bersifat langsung. Dalam konteks bencana dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



**Bagan 4.2 Garis Komando**

Garis komando seperti ini akan memiliki bentuk yang beragam tergantung dengan kondisi yang dihadapi dalam setiap kondisi akan menyesuaikan dengan bentuk-bentuk bencana yang terjadi, garis komando adalah suatu bentuk rantai komando yang berfungsi untuk mempermudah dan memperlancar koordinasi, dengan harapan segala yang dilakukan dan direncanakan tepat sasaran. Sehingga dalam manajemen distribusi logistik alur logistik akan tertata dan proses pendistribusiannya juga akan sangat mudah karena komando mengenai distribusi logistik tersebut sudah sangat jelas.

Garis komando ini dalam setiap tahapnya menetapkan standar yang sama yang pertama kali dilakukan oleh TNI AL untuk mendapatkan gambaran mengenai lokasi bencana adalah dengan melakukan penilaian atau observasi mengenai kondisi lokasi yang terkena bencana. Hasil observasi ini berupa data demografis, geografis setelah informasi ini didapat TNI AL akan langsung berkoordinasi mengenai kondisi lokasi bencana dan menentukan strategi yang akan dilakukan dalam upaya tanggap darurat. Langkah persiapan ini mencakup mengetahui jumlah korban, membentuk posko-posko, menunjuk dansatgas dan petugas untuk setiap posko, lalu koordinasi dengan BNPB. Setelah langkah-langkah ini selesai, langkah selanjutnya adalah pendelegasian komando melalui perintah berjenjang dari BNPB berkoordinasi dengan Mabes TNI sampai ke penunjukan Asops Danlantamal II sebagai Dansatgasla, dan pendalaman pemilihan unsur-unsur yang tepat untuk operasi penanggulangan bencana sesuai kondisi yang ada. Pemilihan unsur-unsur yang tepat untuk operasi terdiri atas dua hal yaitu kesesuaian fungsi dan kedekatan lokasi. dan fungsi pengamanan. Fungsi angkut dipenuhi logistik dari jenis Frosch yang memiliki kemampuan LST (Landing Ship Tank). Kemampuan ini dibutuhkan karena sumberdaya harus diangkut dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Waktu yang singkat ini bukan hanya mencakup waktu

perjalanan, namun juga waktu distribusi ke darat. Fungsi medis diutamakan karena KRI yang memiliki fungsi ini mampu membawa obat-obatan dan berbagai perangkat kesehatan yang lengkap.

- b. TNI AL juga memiliki kesiapan dalam fasilitas perlengkapan untuk mengirimkan logistik bantuan tersebut berupa armada transportasi baik darat maupun laut yang secara khusus dipersiapkan untuk memperlancar proses distribusi logistik bantuan tersebut. Adapun beberapa armada yang telah disediakan oleh TNI AL laut dalam menunjang proses distribusi logistik ini diantaranya adalah kendaraan darat seperti Truk pengangkut logistik untuk lokasi yang mudah dijangkau dan terletak di sekitar Kota Padang. Kapal laut yang dipergunakan untuk mengirim logistik kepulau-pulau sekitar Sumatera Barat yang tidak mungkin dijangkau menggunakan jalur darat. Dan pesawat Cassa dan Helly yang dipergunakan untuk memantau kondisi dari udara.
- c. TNI AL juga memiliki personel terlatih yang memiliki kemampuan, terutama skill-skill yang dibutuhkan dalam kondisi darurat. Selain itu, TNI AL berdasarkan tugas pokok dan fungsinya juga memiliki kewajiban untuk melakukan operasi militer selain perang yang salah satu tugasnya adalah berpartisipasi dalam bencana. Sebagai aparat negara yang dipersiapkan untuk menghadapi segala macam medan pertempuran personel TNI AL memang dipersiapkan dengan kemampuan-kemampuan untuk dapat bertahan disegala kondisi peperangan tersebut untuk menjalankan tugas dengan maksimal, sehingga berpartisipasi dalam bencana adalah salah satu cara untuk tetap mempersiapkan personel TNI AL khususnya dalam kondisi-kondisi darurat yang keadaannya mirip dengan peperangan, tidak saja pada proses distribusi namun juga pada proses pengamanan logistik sehingga logistik bencana tersebut tepat pada sasaran. Seperti diketahui bahwa TNI AL adalah lembaga negara yang bertugas melakukan pengamanan negara kesatuan republik Indonesia,

Peran lain dalam perencanaan logistik yang juga sangat penting adalah peran perencanaan logistik. Peran perencanaan ini sangat berkaitan dengan proses koordinasi yang dilakukan oleh TNI AL dengan institusi yang lainnya, baik itu BNPB, Pemerintah, atau kesatuan yang lainnya seperti TNI AD, TNI AU, dan juga POLRI. Koordinasi yang baik antara seluruh institusi yang terlibat dalam proses tanggap darurat ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana perencanaan distribusi itu akan dibuat, dan bagaimana proses distribusi tersebut akan dilaksanakan apakah melibatkan institusi atau kesatuan yang lain, atau akan dilakukan secara mandiri oleh TNI AL. Koordinasi mengenai pendistribusian logistik ini juga penting untuk mengetahui seberapa banyak logistik yang dimiliki oleh masing-masing pos komando tersebut, sehingga juga tidak terjadi tumpang tindih distribusi logistik yang akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Fungsi koordinasi yang dilakukan oleh TNI AL dalam berpartisipasi pada bencana gempa Sumatera Barat adalah dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam upaya penyelamatan yaitu dengan BPBD, BNPB, Badan SAR Daerah, Kepolisian Daerah, Aparat Desa dan para pihak lainnya yang terkait dengan upaya tanggap darurat bencana. Koordinasi ini dilakukan selain agar tidak terjadi tumpang tindih juga untuk mengetahui jumlah total logistik yang tersedia pada awal-awal tanggap darurat ditetapkan dan dengan berkoordinasi dapat ditetapkan lokasi atau daerah yang terdampak bencana bagian manakah yang akan menjadi prioritas distribusi logistik tersebut.

Bentuk koordinasi TNI AL dengan lembaga-lembaga lain yang juga menangani bencana khususnya masalah pendistribusian logistik pada gempa Sumatera Barat 2009 adalah melalui Kadisbek Lantamal II sebagai fungsi logistik bertugas mengkoordinir dan mengendalikan logistik yang ada di bawahnya, setelah itu bidang administrasi pendataan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Basarnas, kesatuan TNI lainnya, LSM, relawan-

relawan, serta organisasi masyarakat pada titik-titik yang membutuhkan dan termasuk juga dengan Pemda Kota Padang dan Pemprov Sumatera Barat. Dengan harapan dapat mengkoordinir dan membangun partisipasi masyarakat serta kemitraan swasta dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana gempa. Selain itu fungsi koordinasi ini juga melakukan tugas koordinasinya mengenai tugas logistik dengan instansi yang terkait dengan tugas dan pelaksanaan penanganan bencana gempa, sehingga diharapkan tetap terlaksana tugas logistik dengan cepat, tepat dan efisien. Setelah tugas fungsi koordinasi telah dilaksanakan dengan baik kepada komando secara administrative semua pencapaian-pencapaian koordinasi distribusi logistik tersebut di laporkan.

Distribusi logistik adalah suatu sistem yang sangat membutuhkan ketelitian, karena selain membutuhkan koordinasi yang terukur dan tepat, juga membutuhkan keterampilan manajemen yang baik. Selain membutuhkan keterampilan distribusi ini juga memberikan tekanan yang luar biasa besar secara psikologis, karena dalam kondisi bencana tekanan-tekanan masyarakat yang membutuhkan logistik tersebut sangat besar, dalam konteks inilah fungsi koordinasi dan akurasi informasi mengenai kondisi lapangan sangat diperlukan. Kemampuan lain yang juga sangat diperlukan dalam proses distribusi logistik adalah manajemen penerimaan barang dari pencatatan mengenai jumlah, volume, akan memenuhi kebutuhan berapa hari logistik yang diterima tersebut, serta bagaimana proses pembagian logistik untuk masing-masing pos yang membutuhkan.

Selanjutnya pada tahap distribusi logistik juga membutuhkan keterampilan yang tepat, karena perlu diingat bahwa focus distribusi ini terjadi pada awal masa tanggap darurat sehingga dapat dipastikan kondisi lapangan pasca gempa sungguh kacau dan membutuhkan keahlian serta peralatan khusus untuk membuka isolasi titik-titik yang terdampak bencana. Dalam konteks inilah mengapa personel TNI AL dibutuhkan dalam melakukan

upaya distribusi logistik. Selain itu pelibatan personel TNI dalam distribusi logistik ini juga penting untuk menjaga agar logistik yang didistribusikan tersebut tepat kepada sasaran yang dituju.

Terkait pendistribusian logistik ini, selain dilakukan pada lokasi-lokasi yang mudah di jangkau, juga dilakukan pada lokasi-lokasi yang sulit untuk dijangkau, hal inilah yang menempatkan TNI AL sebagai tim pendahulu dalam mendistribusikan logistik sekaligus juga membuka keterisoliran suatu lokasi yang terkena bencana.

Selanjutnya, selain membangun mekanisme distribusi dan mendistribusikan logistik bencana. Bentuk partisipasi personel TNI AL dalam penanggulangan bencana gempa di Sumatera Barat pada September 2009 antara lain adalah : membantu evakuasi penduduk/masyarakat korban gempa, membuka posko penampungan korban dengan mendirikan tenda darurat, memberikan pertolongan rhedis terhadap korban gempa, menerima bantuan logistik lewat Laut (KRI), darat dan udara, mendistribusikan bantuan logistik yang diterima kepada masyarakat, berupa makanan siap saji, air mineral, air bersih, selimut, obat-obatan dan lain-lain.

TNI AL juga terlibat dalam proses pendistribusian tenda pleton (bantuan dari Dinas Pajak) ke masyarakat ke tempat pengungsian masyarakat, membantu pengamanan lalu lintas, dan pengamanan kompleks perumahan umum, membantu pengamanan kantor-kantor Pemerintah dan tempat-tempat rawan longsor dan banjir, membantu penyaluran air bersih dari PDAM Kota Padang ke masyarakat yang membutuhkan air bersih dengan kendaraan truk tangki Lantamal II, truk tangki PDAM, truk tangki Pemko Padang dan truk tangki masyarakat.

Lebih jauh lagi mengenai proses penerimaan logistik, dalam proses ini seluruh logistik yang diterima tersebut harus masuk kedalam proses

pencatatan, mengenai jumlah, volume, jenis logistik. Pencatatan ini juga penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui logistik apa saja yang mengalami kekurangan atau kelebihan. Sehingga dapat dicarikan solusinya bersama-sama untuk menangani kekurangan atau kelebihan logistik tersebut. Dalam tahap pengumpulan logistik ini TNI AL dalam hal ini Lantamal II juga mengumpulkan logistik yang dimiliki oleh Lantamal II, bantuan logistik dari Pemerintah Kota Padang dan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga menyiapkan kendaraan untuk menyalurkan logistik tersebut kepada masyarakat atau ke pos-pos pengungsian.

Setelah logistik diterima dan dilakukan pencatatan, logistik juga secara administrasi juga harus dilakukan pencatatan. Administrasi logistik ini dilakukan sebagai upaya pembukuan sebagai bahan pelaporan dan evaluasi mengenai proses manajemen logistik yang dilakukan selama tanggap darurat berlangsung. Administrasi logistik ini juga memudahkan personel TNI AL dalam mengatur alur distribusi, penempatan logistik sehingga keluar masuknya logistik sangat terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, penyiapan tempat penampungan logistik. Tempat penampungan logistik ini sebisa mungkin tidak jauh dari lokasi-lokasi tanggap darurat. Terkadang untuk mempermudah alur distribusi logistik, tempat penampungan ini juga perlu dipersiapkan lebih dari satu lokasi. Hal ini penting untuk mempercepat dan mempermudah proses distribusi logistik bencana tersebut.

Selanjutnya selain dengan melakukan pembentukan satuan tugas, membentuk tim khusus dalam distribusi logistik. Guna menunjang upaya-upaya tersebut agar bekerja dengan lebih maksimal lagi, maka yang dilakukan oleh TNI AL adalah memberikan fasilitas-fasilitas perlengkapan yang memang sangat diperlukan dalam mendistribusikan logistik.

Beberapa perlengkapan yang disediakan untuk menunjang upaya distribusi logistik tersebut adalah mendatangkan 3 (tiga) KRI dari Armabar untuk membawa dukungan logistik dan 1 (satu) KRI Dr. Soeharso (Kapal Rumah Sakit) untuk penanganan pasien korban gempa serta 2 (dua) Pesawat Cassa, Helly.

Untuk lebih jelasnya partisipasi TNI AL dalam distribusi logistik pada bencana gempa September 2009 yang terjadi di Sumatera Barat, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan informan AN yang merupakan personel TNI AL yang bertugas pada saat tanggap darurat gempa tersebut :

Setelah mendapat tugas dari satuan atas maka dibentuk team tugas dengan melakukan pengorganisasian team (pendata, pendistribusi dan pengaman). Kemudian mulai mendata dan mengecek barang bantuan yang datang melalui pelabuhan Teluk Bayur, Bungus, Bandara Minang Kabau dan yang datang melalui darat yang akan di distribusikan oleh TNI AL. Setelah itu ditempatkan digudang penampungan sementara, kemudian mendata daerah, korban, dan barang yang dibutuhkan dari daerah yang terkena, baru kemudian di distribusikan kepada Daerah, Kecamatan, Desa yang terkena musibah setelah data masuk ke posko induk TNI AL di jalan Bukit Putus Teluk Bayur.

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh TNI AL dalam membantu penanggulangan bencana gempa di Sumatera Barat pada September 2009 yang telah disebutkan di atas semuanya ditujukan sebagai upaya mendistribusikan logistik. Seperti penyiapan perencanaan, penerimaan logistik, administrasi logistik, penyiapan tempat atau gudang penampungan, penunjukkan personel yang terlibat serta teknis pendistribusian kepada masyarakat, termasuk didalamnya juga transportasi yang akan digunakan. Semua tahapan tersebut dilakukan sebagai upaya mempermudah proses distribusi sehingga proses distribusi

itu sendiri memberikan rasa aman bagi masyarakat korban bencana. Karena selain mendistribusikan logistik bantuan, peran TNI yang juga penting adalah menciptakan rasa aman bagi korban bencana.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, hasil wawancara dengan dinas sosial Kota Padang juga mengungkapkan bahwa dalam pendistribusian logistik TNI AL memang lebih difokuskan untuk menjangkau lokasi-lokasi yang tidak bisa dengan mudah untuk dijangkau oleh tim-tim evakuasi yang lainnya. berikut kitipan hasil wawancara dengan informan ZH :

Pada daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau melalui darat dan daerah-daerah yang terisolir, peran TNI AL sangat diperlukan untuk pendistribusian logistik dan evakuasi.

Kemudian pentingnya TNI AL dilibatkan karena memiliki pengalaman dan keahlian seperti :

Evakuasi warga yang terkena bencana, pendirian tenda dapur umum, tenda pengungsian dan pelayanan medis dengan paramedisnya serta menyediakan kapal rumah sakit dan kapal TNI AL untuk angkut logistik yang akan distribusikan oleh Dinas Sosial.

Penjelasan informan tersebut menggambarkan peran dan partisipasi TNI pada bencana gempa di Sumatera Barat tahun 2009 sangat penting mengingat gempa yang terjadi di Sumatera Barat tersebut tidak hanya terjadi di kota tetapi juga daerah-daerah sekitar seperti di pulau-pulau yang ada di Sumatera Barat yaitu, pulau Mentawai, pulau Pagai dan beberapa pulau kecil yang ada di Sumatera Barat lainnya.

Lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi yang sulit dijangkau oleh instansi dan badan-badan lainnya. untuk mencapai lokasi tersebut memerlukan keberanian dan keahlian yang terlatih secara pengalaman untuk melewati jalur-jalur bahaya dan sulit dijangkau serta jaraknya yang sangat jauh yaitu sekitar 80 mil s/d 120 mil. Meskipun tidak terjadi tsunami, seperti yang terjadi di Povinsi Aceh peran dan partisipasi TNI AL sangat

dibutuhkan pada gempa Sumatera Barat tahun 2009. Sebagaimana penjelasan informan dari Dinas Sosial bahwa TNI AL dengan pengalaman dan keahliannya sangat membantu dinas sosial dalam mendistribusikan logistik pada lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Apalagi untuk kondisi tanggap darurat logistik berupa obat-obatan, kebutuhan pokok (makanan), selimut, pakaian, bisa segera didistribusikan pada lokasi-lokasi tersebut.

Gempa yang terjadi pada September 2009 di Sumatera Barat ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga pula bagi TNI AL, karena keadaan yang sangat darurat sehingga pendistribusian dan manajemen logistik tidak dapat tertata dengan baik. Hal lain juga yang membuat manajemen logistik ini tidak maksimal karena jumlah personel anggota TNI AL yang dilibatkan hanya 1/3 bagian dari jumlah personel yang menjadi kebutuhan. Hal ini terjadi karena selain melakukan tugas pendistribusian TNI AL juga perlu melakukan pengamanan dan pembagian pada titik-titik lokasi gempa yang lainnya di sekitar Sumatera Barat.

Beberapa tugas cepat yang dilakukan oleh personel TNI AL dalam penanggulangan bencana gempa di Sumatera Barat pada September 2009 yang secara khusus berhubungan dengan pendistribusian logistik adalah dengan menerjunkan personel TNI AL ke lokasi gempa guna berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat desa, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi lapangan. Hal ini penting dilakukan karena pasca getaran terjadi kepanikan yang meluas sehingga sangat sulit mendapatkan gambaran mengenai kondisi jika tidak langsung melihat dan berkoordinasi. Selanjutnya setelah mendapatkan gambaran informasi lapangan yang lebih akurat tersebut koordinasi dilakukan pula dengan kesatuan lainnya seperti TNI AD, TNI AU dan POLRI untuk mensinergikan data dan informasi temuan serta juga untuk mensinkronkan tugas yang akan di laksanakan oleh masing-masing satuan di lapangan. Setelah proses koordinasi tersebut barulah dilakukan penempatan anggota TNI AL sebagai perwakilan di Pemerintah Daerah Kota Padang

dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk penyaluran logistik yang ada serta sebagai LO TNI AL di Pemda.

Garis koordinasi partisipasi personel TNI AL dalam penanggulangan bencana gempa di Sumatera Barat pada September 2009, terutama dalam pendistribusian logistik pada gempa 2009 di Lantamal II untuk pendistribusian logistik dibawah kendali dan koordinasi Dansatgas Sektor Lantamal II, dalam hal ini logistik langsung di bawah Asisten Logistik Danlantamal II dan Kadisbek Lantamal II. Dansatgas berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar, Pemko/Pemda, TNI AD, TNI AU dan POLRI untuk mensinkronkan data dan tugas yang akan di laksanakan oleh masing-masing satuan di lapangan. Menempatkan personel TNI AL sebagai LO TNI AL di Pemprov Sumbar, Pemko/Pemda untuk mempermudah koordinasi penyaluran logistik. Bentuk koordinasi TNI AL dengan lembaga-lembaga lain yang juga menangani bencana Sumatera Barat pada September 2009 adalah dengan bentuk vertikal dan horizontal.

Selanjutnya, menjadi pilihan yang tepat juga bagi TNI AL jika dalam penanggulangan bencana ini juga melakukan penilaian bagi personel TNI AL yang ada dan secara khusus bertugas dalam mendistribusikan logistik adalah suatu pilihan yang sangat tepat karena selain berfungsi sebagai penerima, pendistribusian, dan pengawasan, TNI AL juga berperan sebagai personel pengaman jalur distribusi logistik. Sehingga dapat dipastikan bahwa logistik tersebut terdistribusi dengan baik. Selain dari tugas-tugas distribusi tersebut, personel lain yang juga memerlukan keahlian khusus dalam tugasnya melakukan penanganan bencana adalah pilot, sopir ambulance, sopir truck, sopir tangki, operator komunikasi, dan juga operator alat berat, serta keahlian pertukangan.

Selain tugas-tugas pendistribusian logistik tersebut, TNI AL juga berperan aktif dalam membantu atau berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi evakuasi dalam masyarakat korban gempa seperti membuka posko

penampungan masyarakat korban gempa dengan mendirikan tenda-tenda darurat baik berupa tenda untuk beristirahatnya masyarakat korban gempa atau juga tenda untuk mempersiapkan logistik bagi para korban dan relawan. Memberikan bantuan medis terhadap korban gempa, Secara khusus mengenai fungsi koordinasi yang dijalankan oleh TNI AL dalam upaya pendistribusian logistik, secara khusus berada di bawah komando Aslog Danlantamal II sebagai fungsi logistik yang secara langsung mengkoordinir dan mengendalikan logistik yang ada di bawahnya dengan mengerahkan personel yang ada serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, LSM, organisasi Masyarakat untuk mendistribusikan pada lokasi yang membutuhkan. Selanjutnya, Aslog Danlantamal II juga berperan dalam mengkoordinasikan proses distribusi logistik ini dengan instansi yang terkait sehingga diharapkan logistik yang ada dapat didistribusikan dengan cepat, tepat, efektif dan efisien. Selanjutnya Aslog Danlantamal II setelah semua proses koordinasi dan distribusi tersebut selesai dilaksanakan akan melaporkan hasil yang sudah dilaksanakan ke komando atas.

Mengenai pos-pos bencana yang paling membutuhkan partisipasi TNI AL terutama dalam pendistribusian logistik bahwa semua tahap pelaksanaan tugas logistik mulai dari pos penerimaan di pelabuhan, pos pergudangan, pos pendistribusian, angkutan/ transportasi, sampai logistik diterima oleh korban gempa. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen yang baik dalam pendistribusian logistik adalah hal yang sangat krusial sehingga sangat berpengaruh pada bagaimana proses persiapan distribusi logistik tersebut dilakukan.

Mengenai berapa jumlah ideal yang harusnya diterjunkan oleh TNI AL dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Sumatera Barat ini berdasarkan wawancara dengan informan NR seperti dapat dilihat di bawah ini :

Jumlah personel ideal yang harus diterjunkan ketika terjadi bencana gempa adalah : 750 s.d 1000 orang. Spesifikasi jumlah personel TNI AL yang dilibatkan dalam penanggulangan bencana gempa Sumatera Barat/Sumbar pada tahun 2009 adalah : Yonmarharlan II 1 SSK, Lantamal II 1 SSK, KRI dari Armabar 2 unit, KRI Rumah Sakit 1 unit. Pelibatan hampir semua personel TNI AL ini dilakukan karena bencana gempa Sumatera Barat tahun 2009 adalah gempa besar yang menghancurkan beberapa daerah di Kabupaten/Kota. Akan tetapi jumlah anggota TNI AL (Lantamal II) yang terlibat sebanyak 314 dari kekuatan yang ada 300 orang termasuk Yonmarharlan II, karena yang 114 kekuatan disiapkan untuk siaga di Mako Lantamal II dan tugas jaga. Selanjutnya ditambah lagi dengan dukungan personel KRI dan Satgas dari Marinir Jakarta 200 orang.

Selain dari melaksanakan tugas pendistribusian logistik, TNI AL juga sangat aktif terlibat dalam penanggulangan bencana lainnya terutama pada penanganan masalah kesehatan. TNI AL secara khusus juga membantu pengobatan gratis untuk warga masyarakat Kota Padang di KRI Rumah Sakit milik TNI AL, evakuasi dan pencarian korban. Serta juga berperan aktif dalam mengamankan objek vital, dan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian sementara masyarakat.

Berkaitan dengan garis koordinasi yang dilakukan oleh TNI AL dari hasil wawancara diketahui sebagai berikut :

Garis koordinasi partisipasi personel TNI AL dalam penanggulangan bencana gempa di Sumatera Barat pada September 2009, terutama dalam pendistribusian Logistik pada gempa 2009 di Lantamal II untuk pendistribusian logistik dibawah kendali dan koordinasi Dansatgas Sektor Lantamal II, dalam hal ini logistik langsung di bawah Asisten Logistik Danlantamal II dan Kadisbek Lantamal II. Dansatgas berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar, Pemko/Pemda, TNI AD, TNI AU dan POLRI untuk mensinkronkan data dan tugas yang

akan di laksanakan oleh masing-masing satuan di lapangan. Menempatkan personel TNI AL sebagai LO TNI AL di Pemprov Sumbar, Pemko/Pemda untuk mempermudah koordinasi penyaluran logistik. Bentuk koordinasi TNI AL dengan lembaga-lembaga lain yang juga menangani bencana Sumatera Barat pada September 2009 adalah dengan bentuk vertikal dan horizontal.

Meskipun semua persiapan dan perencanaan tersebut telah menjadi suatu standar baku dalam penanganan bencana, namun pada saat bencana gempa terjadi di Sumatera Barat tahun 2009 ini semua perencanaan tersebut tidak berjalan dengan maksimal hal ini terjadi karena kondisi darurat dan timbulnya kepanikan di masyarakat maka semua fungsi logistik tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena masih kurangnya personel, dukungan BBM dan alat komunikasi berupa HT sehingga terkendala dalam pendistribusian logistik ke sasaran. Garis koordinasi partisipasi personel TNI AL dalam penanggulangan bencana gempa di Sumatera Barat 2009 di dalam pendistribusian logistik adalah dimana posko mendapat laporan dari masyarakat daerah yang terkena bencana dengan memasukkan permohonan bantuan logistik yang di tanda tangan aparatur daerah setempat dalam hal ini dari Kecamatan, kemudian di sampaikan ke pada yang tertua logistik dan setelah itu diteruskan ke disbek sebagai penerima dan penyimpan bantuan setelah itu di distribusikan ke daerah tersebut.

#### **4.2.3 Kendala yang dihadapi TNI AL dalam penanggulangan Bencana khususnya dalam pendistribusian Logistik**

Pendistribusian logistik sebagai suatu sistem yang terkoordinasi antara satu sama lainnya tentu saja membutuhkan suatu komunikasi yang baik pada masing-masing bagian yang mendukung keberhasilan proses pendistribusian logistik tersebut. Untuk mendapatkan keberhasilan tersebut dibutuhkan upaya evaluasi secara terus menerus sehingga didapatkan suatu model yang paling sesuai yang dapat dijadikan suatu

standar baku dalam proses manajemen distribusi logistik tersebut. Beberapa kendala yang ditemui selama proses distribusi logistik bencana gempa bumi Sumatera Barat 2009 diantaranya adalah; kejadian yang begitu cepat sehingga belum adanya perencanaan untuk tugas-tugas logistik menjadikan proses distribusi logistik ini mengalami kendala, baik dari sisi koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Secara internal juga muncul permasalahan terbatasnya semua pendukung penyaluran logistik baik dari jumlah personel TNI AL yang dilibatkan, tempat penampungan logistik, alat transportasi untuk pengiriman logistik, komunikasi serta data mengenai masyarakat yang menjadi korban dalam bencana gempa bumi tersebut yang akan menerima bantuan logistik. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan logistik digudang penampungan yang berakibat pada penyaluran yang tidak merata dan tidak tepat sasaran.

Pada saat pengorganisasian logistik di lapangan kendala utama yang dihadapi oleh personel TNI AL di lapangan adalah sangat terbatasnya semua pendukung upaya proses pendistribusian logistik dan ketika dilakukan kerjasama dalam penyaluran logistik ini dengan melibatkan organisasi atau institusi lain, ternyata terdapat perbedaan sasaran yang akan menjadi target pendistribusian logistik, selain juga manajemen distribusi logistik juga berbeda, dan juga jauhnya letak gudang penampungan logistik yang terpencar-pencar menyebabkan proses distribusi logistik menjadi tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan pengalaman proses distribusi logistik pada gempa Sumatera Barat 2009, untuk efektifitas dan efisiensi model pendekatan yang harus dikembangkan dalam upaya distribusi logistik adalah dengan menganut pola penyelenggaraan yang melibatkan beberapa lembaga/instansi dalam sistem kelembagaan dalam berbagai wilayah yang dilaksanakan secara terpadu. Secara khusus pada TNI AL apa yang dilakukan oleh personel TNI AL adalah membentuk rayonisasi/wilayah sesuai dengan tempat tinggal personel Lantamal II, dan mengadakan koordinasi dengan personel

dimasing-masing rayon. Selain itu upaya ini juga didukung dengan melakukan pelibatan semua praluri TNI AL untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mendistribusikan logistik yang ada walaupun dengan sarana prasarana transportasi dan komunikasi yang sangat terbatas. Selanjutnya adalah dengan mendatangkan KRI dan pesawat untuk membawa dan mendistribusikan logistik.

Hal ini penting karena daerah yang terkena bencana biasanya memang memiliki cadangan logistik, namun jumlah tersebut tidaklah memadai mengingat kepanikan yang muncul karena bencana tersebut. Selanjutnya ketika semua kondisi sudah berangsur kondusif TNI AL juga mengupayakan melibatkan pihak swasta, lembaga masyarakat untuk bekerjasama dalam mendistribusikan logistik yang sudah ada di gudang TNI AL. selain itu juga menambah gudang dan tenda-tenda untuk menampung logistik yang disalurkan lewat TNI AL.

Tanggapan yang diberikan oleh tim lain mengenai keterlibatan TNI AL dalam pendistribusian logistik ini juga sangat baik, hal ini seperti terungkap dalam wawancara yang dilakukan pada informan HEN yang bekerja pada Basarnas, seperti di bawah ini :

Pelibatan TNI AL dalam pendistribusian logistik adalah suatu yang sangat tepat sekali karena waktu terjadi bencana gempa situasi menjadi kacau, infratraktur banyak yang rusak, untuk itu untuk menormalkan suasana sangat diperlukan orang-orang terlatih seperti TNI AL. Selain itu kesiapan TNI secara perlengkapan juga lebih siap mengingat TNI AL memang memiliki kendaraan-kendaraan yang mampu difungsikan untuk memasuki medan-medan yang berat. Selain itu kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh TNI AL terutama armada laut juga sangat bermanfaat untuk menghadapi segala macam medan dan dengan didukung oleh personel pasukan yang terlatih tentunya pelibatan TNI AL sangat diharapkan sekali untuk menjangkau pulau-pulau yang tersebar di Sumatera Barat.

Koordinasi Basarnas dengan TNI AL selama ini berjalan cukup baik dan harmonis. Sepengetahuan saya para petinggi Basarnas sebagian berasal dari TNI AL/Marinir, ini sangat membantu menjalin hubungan yang harmonis antara Basarnas dan TNI AL. Yang saya lihat waktu gempa bumi tahun 2009 dan tsunami di Mentawai pihak TNI AL sangat intensif memberikan bantuan, selain menyalurkan bantuan juga aktif di pencarian korban, evakuasi korban dengan mobil jenazah dan helikopter milik TNI AL, bantuan kendaraan truk untuk angkut relawan. Memberikan dukungan kesehatan dengan membuka posko kesehatan diatas kapal perang yang sandar di Pelabuhan Teluk Bayur dan lain sebagainya.

Dari pernyataan tersebut sangat jelas terlihat bahwa keberadaan TNI AL dalam penanggulangan bencana terutama pendistribusian logistik menjadi sangat penting karena hanya TNI AL yang memiliki fasilitas yang mampu menjangkau lokasi-lokasi yang sulit untuk membuka keterisoliran suatu daerah akibat bencana yang terjadi tersebut.

Sedangkan tokoh masyarakat YD di Sumatera Barat menyikapi keterlibatan TNI AL dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Sumatera Barat ini dengan sangat positif seperti yang dijelaskan dibawah ini:

TNI AL dengan segala perlengkapan yang mereka miliki untuk membantu pemulihan dan pengiriman logistik telah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Keterlibatan ini menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa proses distribusi logistik ini memang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. TNI AL sangat besar perannya dalam penanggulangan bencana ini tidak saja karena keterlibatannya dalam pendistribusian bantuan, tetapi juga karena keterlibatannya dalam melakukan evakuasi dan pengobatan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana.

Penjelasan dari tokoh masyarakat di atas menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa keterlibatan TNI AL dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ini penting sekali. Artinya bahwa masyarakat juga merasa betul-betul terbantu dengan adanya personel TNI AL dalam penanggulangan bencana ini khususnya dalam pendistribusian logistik.

Selanjutnya salah seorang tetua kampung yang juga menjadi informan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa :

Kami masyarakat Sumatera Barat khusus Padang Alai Pariaman sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan logistik (makanan) dari bapak-bapak Angkatan Laut. Bantuan yang sangat kami butuhkan adalah makanan ( beras, mie, sarden dll) dan, makanan bayi. Kami sangat senang bapak dari Angkatan Laut telah ikut membantu kami. Prinsipnya semakin banyak orang yang mau membantu kami tentunya semakin cepat kami bisa melepaskan diri dari kedukaan akibat bencana.

Pernyataan di atas benar-benar menunjukkan bahwa keberadaan TNI AL dalam membantu masyarakat korban bencana pada saat tanggap darurat memiliki kesan tersendiri bagi masyarakat. TNI AL telah memberi kesan mendalam bagi masyarakat. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa adanya personel TNI AL semakin menguatkan masyarakat bahwa TNI AL sangat peduli dalam mengurangi kesedihan yang dialami masyarakat akibat gempa bumi yang menimpa Kota Padang.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Partisipasi TNI AL dalam penanggulangan bencana**

Kedudukan sebagai TNI AL yang mendapatkan tugas baik secara Undang-Undang dan keorganisasian TNI yang diinstruksikan untuk melaksanakan pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat, maka peran TNI AL mencakup langkah-langkah aktivasi, penerimaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi bantuan logistik pada masa tanggap darurat. Sebagaimana Thomas dan Kopczak (2005) dikutip

Setiawan (2010)<sup>26</sup> Logistik bencana amatlah krusial di dalam kaitannya dengan efektivitas dan kecepatan respons dari program-program bantuan bencana, misalnya kesehatan, makanan, lokasi bagi para pengungsi, air, dan sanitasi; Penyediaan dan transportasi bantuan bagi korban bencana merupakan salah satu bagian paling mahal di dalam upaya-upaya pemberian bantuan; dan data yang tersimpan baik dari berlangsungnya logistik bencana amat berguna sebagai bahan kajian pasca bencana.

Partisipasi tergambarkan lewat keterlibatan TNI AL pada : partisipasi TNI AL dalam penentuan lokasi pusat distribusi bantuan maupun lokasi pengungsian sementara; partisipasi TNI AL dalam penentuan skema alokasi bantuan (baik berupa barang maupun tenaga medis/paramedis) secara efektif dan efisien; partisipasi TNI AL dalam perancangan jaringan distribusi bantuan yang mampu meningkatkan kinerja pemberian bantuan di masa mendatang; dan partisipasi TNI AL dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari berlangsungnya tiga aktivitas pertama.

Partisipasi TNI AL dalam penanggulangan bencana gempa bumi pada september 2009 yang terjadi di Sumatera Barat , sangatlah terlihat setidaknya hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat mengenai bagaimana TNI AL dalam melakukan proses penanggulangan bencananya. Proses keterlibatan TNI ini secara teoritis merujuk pada (Sunarti, 2012:2)<sup>27</sup> dapat dikategorikan sebagai suatu partisipasi terikat. Keterlibatan ini menjadi suatu bentuk partisipasi yang mengikat karena keterlibatan ini merupakan perintah yang menjadi salah satu tugas utama bagi TNI AL yang dimandatkan untuk membantu penanggulangan bencana melalui perintah Undang-Undang. Hal ini menjadi ikatan wajib

---

<sup>26</sup> Setiawan, Eko. Seri Bencana: Logistik di dalam Konteks Manajemen Bencana. <http://umum.kompasiana.com/2010/04/18>

<sup>27</sup> Sunarti, Euis. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/03/Dr.-Euis-Sunarti-Partisipasi-Masyarakat-dalam-Pembangunan-Masyarakat.pdf>

bagi personel TNI AL untuk berpartisipasi dalam menanggulangi bencana tersebut.

Selanjutnya jika dilihat dari cara keterlibatannya, partisipasi TNI AL termasuk dalam partisipasi langsung. Hal ini terlihat dari bagaimana proses partisipasi yang dilakukan oleh TNI AL ini baik dari prosedur penilaian kondisi, partisipasi dalam evakuasi, partisipasi dalam pemulihan kesehatan, partisipasi dalam rekonstruksi, dan khususnya partisipasi dalam pendistribusian logistik. Proses penilaian kondisi dilakukan oleh TNI AL dengan langsung mengirimkan personel ke pusat bencana dan melakukan penilaian mengenai kondisi keseluruhan akibat dari bencana tersebut. Beberapa penilaian yang dilakukan diantaranya hal ini juga menunjukkan bahwa TNI AL berpartisipasi secara aktif dalam adalah terkait dengan berapa jumlah rumah yang rusak, berapa banyak masyarakat yang mengungsi, berapa kebutuhan logistik yang diperlukan, dan berapa korban yang terjebak atau mengalami gangguan kesehatan, seluruh tahap kegiatan sehingga sangat terlihat peran setiap anggota TNI AL dalam penanggulangan bencana tersebut. Dari hasil penilaian kondisi lapangan tersebut TNI AL melakukan pembagian personel untuk menetapkan personel-personel TNI AL pada pos-pos yang memerlukan bantuan cepat seperti evakuasi korban yang terjebak didalam reruntuhan bangunan. Dari kesemua peran partisipasi tersebut, partisipasi yang paling dominan dilakukan oleh TNI AL dalam gempa 2009 adalah proses partisipasi dalam distribusi logistik.

Partisipasi langsung TNI AL ini ditunjukkan dengan secara sigap mengirimkan TNI Angkatan Laut mengerahkan empat KRI jenis Landing Ship Tank (LST), satu KRI jenis Landing Platform Dock (LPD), satu KRI Jenis Kargo, satu KRI jenis Rumah Sakit (KRI Dr. Soeharso) dengan satu helikopter onboard<sup>28</sup>. Pengerahan kapal ini juga dilakukan sebagai upaya

---

<sup>28</sup> <http://www.tandef.net/tni-kerahkan-pasukan-reaksi-cepat-tanggulangi-bencana-sumbar>

membuka keterisoliran suatu daerah yang terkena bencana mengingat Sumatera Barat adalah daerah yang memiliki beberapa pulau kecil berpenghuni, sehingga untuk membuka keterisoliran tersebut paling efektif melalui jalur laut.

Partisipasi TNI AL dalam gempa Sumatera Barat ini adalah suatu yang sangat tepat, karena TNI AL memiliki pangkalan militer di Kota Padang, memiliki personel yang cukup memadai meskipun pada saat bencana tersebut terjadi personel TNI AL yang ada di Sumatera Barat juga merupakan korban dari bencana. Namun kesiapan TNI AL berpartisipasi dalam bencana ini menunjukkan bahwa TNI AL telah menjalankan peran sesuai dengan mandat yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Sedangkan jika dilihat secara organisasi, partisipasi TNI AL dalam penanggulangan bencana ini dapat juga dikategorikan sebagai partisipasi terorganisasi hal ini terlihat dari digunakannya struktur organisasi dan perangkat prosedur tetap organisasi dalam proses persiapannya. Partisipasi TNI ini juga terlihat dengan digunakannya peraturan dan hukum perundang-undangan dalam menginstruksikan keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana tersebut. Peran partisipasi TNI AL ini dikategorikan sebagai partisipasi terorganisasi karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh TNI AL dalam tanggap darurat gempa Sumatera Barat ini merupakan suatu kegiatan yang berdasar pada hasil koordinasi dan observasi lapangan. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh TNI AL ini juga menjadi dasar bagi proses distribusi logistik bencana.

Partisipasi TNI AL dalam penanganan bencana di Sumatera Barat ini juga dapat digolongkan sebagai partisipasi intensif. Hal ini terlihat dari begitu intensnya keterlibatan personel TNI AL dalam penanggulangan bencana khususnya distribusi logistik. Partisipasi ini juga dikatakan intensif bukan saja karena keterlibatan TNI dalam gempa yang terjadi di Sumatera Barat namun karena TNI AL juga selalu turut serta mengirimkan personelnnya

dalam penanggulangan bencana-bencana yang lainnya yang terjadi di Indonesia.

Selanjutnya jika dilihat dari gaya partisipasi yang dilakukan oleh TNI AL partisipasi yang dilakukan oleh TNI AL ini adalah salah satu gaya partisipasi yang bertujuan untuk pembangunan daerah. Yaitu suatu partisipasi sebagai upaya pemulihan dan pembangunan untuk memperbaiki kondisi daerah yang tertimpa musibah gempa bumi pada tahun 2009. Partisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan ini juga dilakukan oleh personel TNI AL meskipun sebagian besar personel berpartisipasi dalam distribusi logistik. Kejadian bencana pada 2009 dan keberadaan TNI AL yang memiliki pangkalan militer di Sumatera Barat menjadi suatu peran yang sangat strategis yang dapat dilakukan oleh TNI AL. Ketika gempa baru saja terjadi, TNI AL langsung mengerahkan personelnnya untuk berpartisipasi dalam proses tanggap darurat. Hal ini dilakukan selain karena merupakan suatu tugas juga menjadi suatu acuan dan informasi bagi masyarakat di luar lokasi bencana dalam berpartisipasi. Partisipasi ini juga dapat digolongkan sebagai partisipasi yang bertujuan untuk perencanaan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan sosial.

Partisipasi TNI AL dalam kegiatan tanggap darurat bencana pada gempa Sumatera Barat ini juga dapat dikategorikan sebagai partisipasi dalam perencanaan sosial dan partisipasi dalam kegiatan sosial karena selain berpartisipasi dalam rangka melakukan membantu meringankan beban masyarakat dengan proses evakuasi, distribusi logistik dan aktivitas tanggap darurat yang lainnya, partisipasi TNI AL ini juga memiliki tujuan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat tentang bagaimana merencanakan suatu perencanaan sosial dalam mempersiapkan kondisi darurat yang diakibatkan oleh bencana. Partisipasi ini juga dapat disebut sebagai partisipasi dalam kegiatan sosial karena dalam partisipasi ini tujuan utama dari upaya partisipasi ini adalah kegiatan sosial.

Beberapa bentuk partisipasi dapat digambarkan sebagai suatu upaya keterlibatan TNI AL secara langsung dalam upaya memberikan kontribusi nyata secara sosial bagi masyarakat dalam rangka melakukan upaya tanggap darurat. Partisipasi TNI AL dalam upaya tanggap darurat ini juga dapat dimaksudkan sebagai upaya edukasi yang dilakukan oleh TNI AL kepada masyarakat bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab personel TNI AL bukan cuma melakukan Operasi Militer dalam bentuk peperangan. Tetapi juga melakukan Operasi Militer yang bukan melakukan peperangan dan juga memiliki fungsi sosial yang sangat kental. Dengan adanya proses partisipasi ini juga diharapkan dapat menjadi penggerak munculnya partisipasi masyarakat luas dalam pembangunan suatu daerah yang hancur akibat bencana seperti yang terjadi di kota Padang. Dengan kata lain selain partisipasi yang bersifat sosial, tujuan TNI AL berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana ini adalah merangsang partisipasi masyarakat dan untuk mengumpulkan energi sosial yang dapat membawa mereka untuk menolong dirinya sendiri.

Dukungan yang diberikan TNI AL dalam bentuk distribusi ini dilakukan dalam bentuk logistik yang menjadi kebutuhan harian masyarakat korban bencana yaitu kebutuhan pokok. Dukungan logistik ini sebisa mungkin diberikan secara tepat baik waktu, tempat, jumlah, kualitas, kebutuhan dan sasarannya berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan yang informasinya didapat melalui upaya observasi atau pengamatan langsung lapangan mengenai kondisi yang terjadi baik mengenai jumlah korban, tingkat kerusakan, lokasi pengungsian, aksesibilitas dan jumlah korban yang mengungsi.

Dengan kemampuan penunjang berupa fasilitas yang memadai untuk memasuki medan-medan berat TNI AL dapat berimprovisasi dalam upaya mendistribusikan logistik ketempat-tempat yang sulit dijangkau hal ini didorong oleh saat bencana gempa bumi September 2009 BPBD belum terbentuk di Sumatera Barat. Pada saat bencana gempa yang terjadi di

Sumatera Barat ini secara khusus TNI AL mengirimkan 3 buah kapal yaitu 2 kapal jenis LST (Landing Ship Tank) dan satu buah kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit untuk menampung korban sakit. Serta 2 buah pesawat yang dapat dipergunakan sebagai pengirim logistik dari udara. Hal ini dapat dilihat bahwa TNI AL juga telah mempertimbangkan bentuk-bentuk strategi distribusi logistik yang memerlukan cara penyampaian yang berbeda mengingat keterbatasan transportasi yang bisa saja muncul akibat terjadinya kerusakan akibat bencana yang terjadi yang memungkinkan terjadinya keterbatasan fasilitas transportasi, lokasi-lokasi terdampak yang tersebar sehingga mengalami kesulitan untuk menjangkau, serta terjadinya kesulitan untuk memasuki lokasi karena keterisoliran lokasi akibat dari bencana gempa tersebut.

Upaya distribusi logistik yang dilakukan oleh TNI AL ini juga mencakup upaya inventarisasi kebutuhan. Yaitu suatu upaya analisis mengenai logistik apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat korban bencana. Upaya inventarisasi ini adalah upaya yang dilakukan setelah mendapatkan informasi menyeluruh mengenai kondisi lokasi bencana setelah proses observasi atau penilaian dilakukan. Inventarisasi ini juga mencakup semua rencana mengenai proses distribusi logistik baik dari pengadaan logistik, penyimpanan logistik, dan pendistribusian logistik, hingga pertanggung jawaban logistik. Upaya inventarisasi ini sangat erat kaitannya dengan strategi manajemen logistik yang akan diterapkan dalam upaya tanggap darurat tersebut. Dalam konteks bencana gempa bumi Sumatera Barat 2009, TNI AL menjadi pusat segala urusan yang berkaitan dengan logistik, sehingga hal ini memudahkan dalam proses manajemen logistik bantuan tersebut. Dalam menginventarisasi kebutuhan bencana, yang dilakukan oleh TNI AL adalah dengan langsung melakukan pendataan di lokasi-lokasi yang paling parah keadaannya dan melakukan pendataan mengenai kebutuhan-kebutuhan mendesak yang diperlukan, seperti berapa banyak kebutuhan terpal untuk tenda pengungsian, kebutuhan makanan, pakaian, obat-obatan, air bersih pada satu posko

atau lokasi. Inventarisasi kebutuhan ini sangat penting dilakukan karena akan berhubungan dengan ketersediaan logistik yang dimiliki oleh daerah ataupun TNI AL, informasi-informasi ini sangat penting bagi tim pendukung dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Dalam mewujudkan partisipasi TNI AL dalam upaya tanggap darurat khusus pada proses distribusi logistik tersebut koordinasi yang dipergunakan untuk mempermudah proses ini adalah dengan membentuk persepsi, visi dan misi diantara institusi yang terlibat dalam penanggulangan bencana alam diantaranya adalah adanya kebersamaan dalam aspek perencanaan, persiapan dan pelaksanaan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing baik dari intern TNI AL, pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Dengan kata lain BNPB sebagai lembaga yang memiliki wewenang koordinasi secara jelas harus memposisikan peran masing-masing institusi seperti TNI AL dalam upaya penanggulangan bencana. Hal ini penting untuk memberikan kepastian sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dalam penanggulangan bencana. Selain itu adanya kepastian ini juga justru akan memudahkan alur koordinasi, sehingga manajemen distribusi logistik ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Keterpaduan ini juga akan memberikan dampak positif bagi proses-proses pendistribusian logistik. Adanya kepastian ini bukan saja akan memudahkan proses distribusi logistik, tetapi juga akan memudahkan proses distribusi relawan yang akan datang nantinya, karena jika tidak diarahkan dengan benar maka yang akan terjadi justru akan terjadi simpang siur mengenai proses dan alur komando dalam penanggulangan bencana itu sendiri.

Mengingat proses pendistribusian logistik adalah suatu proses yang sangat rumit dan memerlukan perhatian yang sangat khusus. Maka kepastian tentang lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan

dalam pendistribusian logistik menjadi penting, karena jika tidak maka akan muncul kekacauan dalam proses distribusi logistik ini.

Sebagai suatu langkah yang diambil untuk memindahkan dan menyimpan barang bantuan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, distribusi logistik berpengaruh langsung dalam penyediaan bantuan kepada pengungsi bencana proses manajemennya harus baik. Baik dari proses penerimaannya ke gudang penampungan maupun ketika proses pendistribusiannya.

Manajemen distribusi yang baik juga diperlukan untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat luas untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Sehingga tidak terjadi penumpukan pada satu barang kebutuhan namun terjadi kekurangan pada satu barang kebutuhan yang lainnya.

Informasi yang baik mengenai distribusi ini juga akan memberikan gambaran mengenai jenis-jenis kebutuhan apa saja yang paling dibutuhkan dan harus segera dipenuhi. Sehingga memudahkan komando berkoordinasi dengan instansi yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut.

Dari uraian di atas, dapat dijabarkan bahwa logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material-material / alat-alat.

Dalam kondisi bencana, agar sistem distribusi logistik berjalan efektif maka dibutuhkan suatu manajemen logistik. BNPB mengartikan logistik sendiri sebagai sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. secara umum BNPB masih melihat logistik dalam konteks yang luas, sedangkan personel TNI lebih melihat

logistik sebagai kebutuhan penting dan mendesak yang pemenuhannya harus segera dilakukan. Logistik ini penting karena jika tidak segera dipenuhi maka akan memunculkan adanya potensi terjadinya konflik, seperti persaan tidak diperhatikan, merasa ingin didahulukan sehingga memaksa pengungsi melakukan pembajakan mobil yang mengangkut logistik. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembako (sembilan bahan pokok), obat, pakaian dan kelengkapannya, air, jas tidur dan sebagainya.

Jadi distribusi logistik bencana, dapat pula diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk memindahkan dan menyimpan barang dengan Perencanaan dan pengembangan, pengadaan, penyimpanan, pemindahan, penyaluran, pemeliharaan, pengungsian dan penghapusan alat alat. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material-material/alat-alat.

Beberapa partisipasi TNI AL dalam pendistribusian logistik pada saat tanggap darurat ini diantaranya adalah dengan memfungsikan pangkalan militernya sebagai tempat atau pintu masuk bagi berdatangnya logistik dari luar daerah. Selain itu pangkalan Militer AL yang memang berfungsi sebagai pusat pelayanan seperti mengatur hiling mudiknya kapal, mengatur pesawat yang akan takeoff ataupun landing dan juga menerima logistik yang berdatangan dari luar Jawa maupun Sumatera (Palembang, Bengkulu, Jambi, Lampung) dan setelah itu baru dilakukan proses pendataan dan pendistribusian.

Adanya Pangkalan TNI AL dan besarnya partisipasi TNI AL dalam tanggap darurat bencana ini menunjukkan bahwa peran TNI AL dalam bencana sangat strategis, selain dari keterlibatan teknologi juga dalam pelibatan personel yang jumlahnya sangat banyak. Hal ini menjadi penting

karena pada saat itu belum banyak orang, masyarakat atau bahkan relawan yang berada di lokasi kejadian. Sehingga, tahapan tindakan yang dilakukan oleh TNI AL ini menjadi sangat besar maknanya bagi masyarakat.

Dari penjabaran mengenai langkah-langkah partisipasi TNI AL dalam mendistribusikan logistik dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh TNI AL telah sejalan dengan segi-segi: Perencanaan dan pengembangan, pengadaan, penyimpanan, pemindahan, penyaluran, pemeliharaan, pengungsisan dan penghapusan alat alat perlengkapan. Pemindahan, pengungsisan dan perawatan personel. Pengadaan dan pembuatan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan penghapusan fasilitas-fasilitas. Pengusahaan atau pemberian layanan atau bantuan dalam hal ini mencakup perencanaan termasuk pula penentuan kebutuhan-kebutuhan serta penggunaannya.

Lebih jauh lagi dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh TNI AL dalam mendistribusikan logistik ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Subagja (1988).<sup>29</sup>

Subagja (1988)<sup>30</sup> menjelaskan bahwa logistik merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan perencanaan dan pengembangan, pengadaan, penyimpanan, pemindahan, penyaluran, pemeliharaan, pengungsisan dan penghapusan alat alat perlengkapan. Pemindahan, pengungsisan dan perawatan personil. Pengadaan dan pembuatan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan penghapusan fasilitas-fasilitas. Pengusahaan atau pemberian layanan atau bantuan dalam hal ini mencakup perencanaan termasuk pula penentuan kebutuhan-kebutuhan serta penggunaannya.

---

<sup>29</sup> Subagya, H (1988). Manajemen Logistik. C. V. Haji Masagung. Jakarta

<sup>30</sup> Subagya, H (1988). Manajemen Logistik. C. V. Haji Masagung. Jakarta

Sejalan dengan apa yang dijabarkan di atas. TNI AL juga mengupayakan hal tersebut dalam pendistribusian logistik selama tanggap darurat tersebut dilakukan. Semua ini dilakukan sebagai upaya memberikan jaminan-jaminan bagi masyarakat agar masyarakat mendapatkan bantuan yang sesuai sesaat ketika bencana tersebut baru saja terjadi.

Secara khusus dalam penanganan bencana terutama dalam penentuan tempat atau lokasi pusat distribusi bantuan ataupun lokasi pengungsian sementara, partisipasi TNI AL terlihat sangat besar. Partisipasi TNI AL ini terutama dalam penentuan pusat distribusi bantuan di mana dalam menentukan letak dan pusat evakuasi atau pengungsian sementara, TNI AL berperan dan membantu membangun tenda-tenda darurat untuk pengungsi, mempersiapkan tenda untuk keperluan logistik, dan juga membuat strategi ataupun lokasi penempatan tenda/gudang penampungan logistik yang memudahkan proses penyiapan dan pendistribusian logistik. Dalam penentuan lokasi evakuasi TNI AL tetap mengacu pada rencana tanggap darurat yang telah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), namun dalam proses pembangunan pusat pengungsian ataupun pusat logistik ini personel TNI AL sangat berperan dengan segala kemampuannya dalam melakukan persiapan-persiapan pengungsian tersebut. Selain melakukan upaya-upaya tanggap darurat bagi masyarakat TNI AL juga melakukan upaya tanggap darurat bagi keluarga mereka. Atas dasar inilah maka TNI AL dalam partisipasinya membagi tim dalam melakukan upaya tanggap darurat dalam beberapa posko.

Secara teoritik proses pelaksanaan pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat mencakup langkah-langkah aktivasi, penerimaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi bantuan logistik. Langkah-langkah aktivasi dalam pengelolaan bantuan logistik adalah, mengaktifkan bidang logistik dari Pos Komando pada status keadaan

darurat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Mendukung penyelenggaraan Pos Komando tanggap darurat. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.

Langkah-langkah penerimaan dalam pengelolaan bantuan logistik adalah dengan mencatat jenis, jumlah dan mutu logistik yang diterima dari berbagai sumber. Menyeleksi dan mencocokkan bantuan logistik sesuai skala prioritas kebutuhan. Menyimpan logistik ditempat yang mudah diakses. Sedangkan sumber penerimaan logistik dapat berasal dari dalam dan luar negeri antara lain dari masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha.

Selanjutnya proses penerimaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana dimulai dari pencatatan dan pengecekan, sumber bantuan, waktu diterima, jenis dan jumlah bantuan, cara penyimpanan, transporter, sasaran penerima bantuan, yang dilaksanakan oleh koordinator bidang logistik.

Langkah-langkah penyimpanan dalam pengelolaan bantuan logistik yaitu dengan; Memilih gudang dengan memperhatikan tempat, tipe gudang, kapasitas, fasilitas, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai ketentuan yang berlaku. Menyimpan bantuan logistik di gudang, dengan melakukan pencatatan, pemilahan dan penyusunan barang logistik disesuaikan dengan jenisnya serta pengecekan stok barang logistik secara periodik. Menata kelola bantuan logistik sehingga memudahkan dalam penerapan system "*First-In First-Out*", *First Expired First Out*. Menjaga bantuan logistik dari kerusakan dan kehilangan maupun berkurangnya standar mutu.

Langkah-langkah pengangkutan dalam pengelolaan bantuan logistik adalah dengan mengangkut dan atau memindahkan logistik dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima. Menjamin keamanan, keselamatan dan

keutuhan logistik dari gudang ke tujuan. Mempercepat penyampaian. Pentingnya partisipasi TNI AL dalam pengelolaan bantuan logistik ini juga lebih diutamakan dalam menjamin keselamatan dan keutuhan logistik. Dalam kondisi darurat potensi untuk terjadinya kekacauan dan pembajakan logistik oleh masyarakat sangat mungkin terjadi namun dengan adanya partisipasi TNI AL dalam distribusi logistik tersebut dapat memberikan jaminan bahwa logistik tersebut terdistribusi ke tempat yang tepat. Jenis pengangkutan terdiri dari angkutan darat, air dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku. Pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan: skala prioritas kebutuhan; jenis dan jumlah bantuan logistik; situasi dan kondisi keadaan darurat; ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada; kondisi wilayah asal dan tujuan; efektifitas dan efisiensi; dan keamanan dan keselamatan.

Untuk menghindari terjadinya distribusi yang tidak seimbang maka pengangkutan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan bantuan logistik yang harus dilengkapi dengan data (jenis, jumlah, tujuan, pengirim, transportasi termasuk pengawasan, dan penerima), dan berita acara serah terima barang.

Kesemua tahapan proses distribusi logistik ini dilakukan oleh TNI AL sebagai upaya untuk mendapatkan proses distribusi yang efektif dan efisien. Tahapan ini menjadi standar baku sehingga semua proses tersebut berjalan sesuai rencana dan efisien. Sehingga jika dikaitkan dengan teori manajemen logistik, maka apa yang dilakukan oleh TNI AL ini telah sesuai dengan manajemen logistik yang berhubungan dengan kebencanaan.

Selanjutnya, dalam skema penentuan alokasi bantuan baik berupa barang, tenaga medis, ataupun kebutuhan logistik berupa makanan yang efektif dan efisien, yang dilakukan TNI AL pertama kali adalah melakukan

penilaian dan penggalian informasi melalui pengamatan langsung kondisi lapangan terkait jumlah korban jiwa, korban yang luka-luka baik luka parah ataupun luka ringan, tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut, jumlah pengungsi yang mengungsi dan aksesibilitas menuju lokasi bencana tersebut. Informasi awal yang didapat dari penilaian-penilaian kondisi lapangan inilah yang menjadi acuan dalam merencanakan suatu skema atau strategi alokasi bantuan atau logistik yang efektif dan efisien. Hasil penilaian ini juga menjadi acuan TNI AL dalam mempersiapkan dan menurunkan personel sesuai kebutuhan yang terjadi di lapangan tersebut. Skema-skema yang ditentukan oleh TNI AL ini selain untuk menghasilkan suatu hasil efektif dan maksimal, skema ini ditentukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan sumberdaya personel TNI AL pada satu lokasi tertentu saja, hingga bantuan personel yang lebih besar lagi datang untuk membantu proses tanggap darurat pada saat bencana gempa Sumatera Barat terjadi.

Pada saat tanggap darurat atau pada saat bencana baru saja terjadi keadaan sangat darurat, semua orang termasuk personel TNI AL juga melakukan pengungsian dan evakuasi bagi keluarga mereka masing-masing, meskipun personel TNI AL ini juga melakukan upaya penyelamatan bagi masyarakat akan tetapi personel TNI AL tersebut juga perlu mempersiapkan keluarga mereka sendiri terlebih dahulu. Hal ini membuat upaya tanggap darurat menjadi terbagi pada beberapa titik, hal ini juga menjadi pertimbangan bagi TNI AL dalam menentukan skema distribusi logistik tersebut.

Dalam perancangan jaringan distribusi bantuan, upaya partisipasi yang dilakukan oleh TNI AL selain dari mempersiapkan data atau informasi yang akurat mengenai kondisi lokasi bencana ketika bencana baru saja terjadi. TNI AL juga melakukan upaya penyusunan rencana strategi jaringan distribusi. Strategi jaringan distribusi ini adalah suatu rencana

yang dibuat sebagai acuan untuk kemajuan strategi di masa yang akan datang.

Dalam strategi jaringan distribusi TNI AL melihat bahwa distribusi logistik menjadi suatu hal yang sangat penting mengingat kebutuhan seluruh korban harus terdistribusi dan tepat sasaran. Strategi jaringan yang baik dalam upaya distribusi ini adalah dengan membuat suatu keterpaduan antara pemerintah, swasta, media, kelompok-kelompok masyarakat dan TNI AL dalam menyediakan bantuan logistik bagi korban bencana tersebut. TNI AL bersama BNPB dan BPBD bersama-sama mempersiapkan suatu strategi yang dapat dipergunakan dalam setiap kondisi bencana, dalam melengkapi kebutuhan logistik juga melibatkan media sehingga dengan adanya keterlibatan media ini diharapkan setiap informasi mengenai kebutuhan logistik selama bencana terjadi ini dapat terinformasikan kepada masyarakat dan dapat segera mendapatkan bantuan. Dengan kata lain, strategi penanganan bencana ini merupakan strategi menyeluruh baik dari persiapan, penanganan, ataupun pendistribusian. Adanya strategi ini diharapkan akan mengurangi beban dan kekhawatiran masyarakat korban bencana gempa Sumatera Barat 2009.

Dalam menunjang efektifitas dan efisiensi tiga aktivitas yang telah diuraikan di atas, selain mengedepankan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan bencana TNI AL secara proaktif dalam membuka jalur komunikasi sipil guna menunjang penyebaran informasi yang lebih efektif mengenai kondisi yang ada di lokasi bencana.

Pengurangan resiko bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang dihadapi masyarakat. Pertanyaan sentral berikutnya adalah strategi apa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa strategi yang dapat

digunakan dalam upaya mengurangi resiko bencana tersebut yaitu Strategi *pertama*: mencegah kejadian bencananya, yaitu dengan sama sekali menghilangkan atau secara signifikan mengurangi kemungkinan dan peluang terjadinya fenomena yang berpotensi merugikan tersebut. Dalam konteks ini bencana yang dapat dicegah ini adalah bencana yang terjadi akibat ulah manusia, seperti banjir yang disebabkan oleh tumpukan sampah. Untuk mencegah terjadinya banjir maka yang harus dilakukan adalah tidak lagi membuang sampah di sungai sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. Kalau ini tidak dapat dicapai, maka strategi *kedua* adalah dengan melakukan berbagai cara untuk mengurangi besarnya dan keganasan kejadian tersebut dengan mengubah karakteristik ancamanannya, meramalkan atau mendeteksi potensi kejadian, atau mengubah sesuai unsur-unsur struktural dan nonstruktural dari masyarakat. Jika kejadian memang tidak dapat dihindarkan atau dikurangi, maka strategi *ketiga* adalah dengan mempersiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menghindari atau merespon kejadian tersebut secara efektif sehingga kerugian dapat dikurangi. Strategi yang *keempat* adalah dengan secepatnya memulihkan masyarakat korban bencana dan membangun kembali sembari menguatkan mereka untuk menghadapi kemungkinan bencana masa depan.

Tahapan ideal saat ini belum bisa sepenuhnya terlaksana, karena banyak hal yang mempengaruhinya, namun upaya-upaya untuk mengarah pada perubahan tersebut telah dilakukan. TNI AL sebagai suatu lembaga yang memiliki kemampuan dalam penanggulangan bencana juga terus mengedukasi masyarakat agar memiliki pemahaman dan kepercayaan diri dalam menghadapi bencana, sehingga kecelakaan-kecelakaan yang terjadi akibat munculnya kepanikan akibat bencana dapat diminimalisir. Upaya-upaya edukasi ini juga menjadi tanggung jawab TNI AL yang juga termasuk dalam salah satu tugas dan kewajiban TNI AL dalam operasi militer bukan perang.

Meskipun upaya-upaya edukasi tersebut terus dilakukan, namun selama ini penanganan bencana masih difokuskan pada saat kejadian bencana melalui pemberian bantuan darurat berupa: pangan, penampungan, dan kesehatan. Tujuan utama penanganan seperti ini adalah untuk meringankan penderitaan korban, kerusakan ketika terjadi bencana, dan segera mempercepat pemulihan. TNI AL juga berperan dengan sangat besar terhadap pada upaya-upaya ini. Management distribusi logistik yang dilakukan oleh TNI AL adalah salah satu bentuk partisipasi TNI AL dalam upaya melakukan pemulihan kondisi bencana.

Sudah seharusnya penanganan bencana tidak lagi dipandang sebagai suatu rangkaian tindakan khusus yang terbatas pada keadaan darurat saja. Penanganan bencana saat ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan atau suatu paket kegiatan baik ada kedaruratan ataupun tidak. Setiap aspek penanganan bencana harus menjadi suatu agenda rutin yang dilakukan dalam setiap aktivitas keseharian pada saat kondisi tidak sedang dalam keadaan darurat. Dengan demikian, upaya penanganan bencana ini membuka ruang terhadap adanya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan elemen-elemen lainnya yang peduli pada kondisi bencana yang terjadi di Indonesia. TNI AL sebagai lembaga Negara yang merupakan mitra penting BNPB memiliki tanggung jawab dalam membina masyarakat.

Dengan peran dan partisipasi dalam distribusi logistik ini, TNI AL menunjukkan keberhasilannya menerapkan teori manajemen logistik bencana sesuai dengan teori emergency logistik. Keberhasilan ini disebabkan oleh berjalannya fungsi koordinasi dan akuratnya informasi mengenai kondisi lokasi bencana sehingga memudahkan TNI AL dalam membuat suatu strategi perencanaan dalam rangka distribusi logistik tersebut. Strategi yang dipergunakan oleh TNI AL dalam menjalankan perannya dalam distribusi logistik ini mengungkapkan tiga hal penting yaitu: koordinasi yang baik telah memberikan keleluasaan bagi TNI AL

dalam upaya mempersiapkan personel dan posko-posko distribusi logistik bencana; dan akurasi informasi yang diperoleh melalui proses observasi dan penilaian kondisi lapangan telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai lokasi, tingkat kerusakan, aksesibilitas, dan strategi yang digunakan dalam mendistribusikan logistik bencana.

Strategi yang digunakan TNI AL dalam menjalankan operasi mobilisasi ini mengungkapkan tiga hal yang penting yaitu : persiapan unsur-unsur dalam jumlah yang cukup banyak dan siap gerak; menyiapkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana; dan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki TNI AL untuk juga selalu siap siaga sehingga bila ada bencana dapat digerakkan seketika. Strategi ini meningkatkan reputasi TNI AL dalam artian membangun hubungan baik dan citra positif TNI AL terhadap masyarakat baik.

Upaya edukasi yang dilakukan oleh TNI AL dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap bencana ini merupakan suatu upaya persiapan untuk menghadapi bencana-bencana yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Sumatera Barat. Hal ini terungkap dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI akan ada gempa yang berkekuatan di atas 8 SR maka daerah sepanjang pantai barat Sumatera akan kena dampak paling parah seperti Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai. Provinsi Bengkulu yang meliputi Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Dan Provinsi Sumatera Utara meliputi wilayah Pulau Nias dan Sibolga.

Oleh karena begitu besarnya lingkup daerah yang terkena bencana baik korban nyawa ataupun barang tentunya hal ini tidak akan bisa diatasi oleh

Pemerintah Daerah saja, perlu adanya peran aktif dari Pemerintah Pusat. Hal ini penting karena petugas terlatih yang ada di lokasi baik dari kalangan TNI, Kepolisian, dan Sipil (BPBD, Basarnas) tentunya tidak juga bisa diandalkan, hal ini karena yang bersangkutan juga merupakan bagian yang terkena bencana. Sehingga untuk mengefektifkan jumlah personel terlatih dalam distribusi logistik ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama pada hari pertama dan kedua pasca bencana terjadi.

Dalam semua bencana yang terjadi, memang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan TNI untuk berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana. Ada peran-peran yang langsung diambil oleh setiap angkatan tersebut, seperti evakuasi, rekonstruksi, pengamanan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Namun dalam konteks gempa Sumatera Barat dan pengalaman pada tsunami yang terjadi pada tahun 2007 di Mentawai. Partisipasi TNI AL dalam pendistribusian logistik ini tepat karena fasilitas pengangkutan yang dipergunakan oleh TNI AL memang secara khusus dipersiapkan untuk menghadapi segala macam medan yang berat.

Pada saat gempa September 2009 meskipun tidak terjadi tsunami karena gempa pada September 2009 jenisnya berbeda yaitu gempa yang terjadi di daratan. Tetapi peran dan partisipasi TNI AL tetap penting hal ini dikarenakan pada gempa tersebut TNI AL terlibat langsung pada partisipasi teknologi dimana Armada AL digunakan untuk pengiriman berbagai bantuan logistik dari beberapa daerah seperti dari Pulau Jawa, pulau Sumatera (Bengkulu, Medan, Palembang, Jambi, dll). Pada saat pendistribusian ke titik-titik lokasi bencana, TNI AL berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lainnya untuk secara langsung mengirimkan logistik ke lokasi bencana.

Selain itu, TNI AL juga secara langsung berpartisipasi dalam memberikan bantuan-bantuan pada saat tanggap darurat khususnya di daerah Padang Alai seperti, bantuan medis, obat-obatan, pakaian, pencarian korban,

pendirian tenda dapur umum, tenda darurat untuk mengungsi. Karena pada saat itu juga terjadi longsong.

Dengan pengalaman pengiriman pasukan dalam bencana, meskipun satuan TNI AL, tapi mereka juga dapat berperan dan berpartisipasi untuk melakukan proses tanggap darurat di darat seperti pada kasus gempa yang terjadi tahun 2009.

Kedua, TNI AL ini pada saat terjadi gempa meskipun tsunami atau tidak TNI AL harus tetap siaga, artinya TNI AL harus tetap dilibatkan dalam segala bentuk bencana, karena sesuai dengan hasil mitigasi bencana bahwa prediksi akan terjadi gempa yang lebih besar lagi dari gempa yang terjadi 30 September 2009. Prediksi tersebut juga telah memetakan zona daerah-daerah yang akan terkena dampak gempa tersebut. Artinya karena itu baru prediksi kemungkinan-kemungkinan dampak yang akan terjadi bisa saja sangat parah dan memungkinkan terjadi tsunami atau sebaliknya. Oleh karena itu TNI AL tetap dibutuhkan dalam bencana gempa di Sumatera Barat dan sekitarnya. meskipun tidak terjadi tsunami namun TNI AL kedepannya harus tetap siaga.

Kesiapsiagaan ini, adalah suatu yang penting mengingat Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan terjadi bencana. Sehingga setiap kesatuan diwajibkan untuk memiliki kesiagaan agar dapat segera diturunkan ketika suatu bencana terjadi. Kesiagaan ini penting dilakukan dalam lingkup nasional, karena belajar dari pengalaman yang terjadi di Sumatera Barat, dimana meskipun TNI AL memiliki pangkalan militer namun sebagai lokasi terjadinya bencana, personel TNI AL yang ada di Sumatera Barat juga merupakan korban sehingga partisipasinya akan tidak maksimal karena juga harus berfokus pada proses evakuasi keluarga.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Ketika bencana gempa tahun 2009 di Sumatera Barat melanda peran TNI AL sangat dibutuhkan, mengingat saat terjadi bencana sebagian besar fasilitas darat dan udara mengalami gangguan, maka jalur laut adalah salah satu strategi penanganan bencana pada saat tanggap darurat. Peran TNI AL terlihat dari partisipasi yang dilakukan. Partisipasi personel TNI Angkatan Laut (AL) dalam penanggulangan bencana khususnya dalam pendistribusian logistik adalah suatu yang sangat tepat selain amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI juga didorong belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, disamping itu juga TNI AL sebagai institusi Militer didukung oleh personel yang sangat terlatih dalam menghadapi situasi kedaruratan, dan juga karena TNI AL yang memiliki perlengkapan yang bisa dialihfungsikan untuk kegiatan transportasi untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit sehingga dapat menjadi pembuka jalan bagi regu-regu penyelamat lainnya dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kehadiran personel TNI AL dalam pendistribusian logistik sangat terbantu sekali khususnya sebagai tambahan tenaga terlatih untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolir karena adanya gempa bumi.

Terjadinya bencana yang sangat cepat dan sangat besar tersebut, telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, baik korban jiwa, rumah yang hancur, rusak berat, rusak ringan, telah mendorong TNI AL yang memiliki pangkalan di Sumatera Barat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana tersebut sedari awal bencana terjadi.

Beberapa hal yang dilakukan oleh TNI AL dalam upaya penanggulangan bencana tersebut adalah seperti menerjunkan tim untuk pertama kali dalam rangka melakukan upaya pendataan atau penggalian informasi, selanjutnya berkoordinasi dan para pihak dan instansi lain, melakukan upaya segera dengan membentuk pos-pos penanggulangan bencana. Dan yang terpenting adalah melakukan serangkaian upaya untuk mendistribusikan logistik bagi masyarakat yang terkena bencana. Selain itu TNI AL juga secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tanggap darurat lainnya yaitu dengan menurunkan tim kesehatan beserta kapal rumah sakit, juga menyediakan dua armada kapal untuk penyaluran logistik ke wilayah-wilayah yang sulit untuk dijangkau.

Sedari awal TNI AL juga telah sangat aktif berpartisipasi dalam melakukan upaya evakuasi korban bencana dengan menerjunkan tim langsung kelokasi-lokasi reruntuhan akibat gempa bumi. Serta juga berperan serta dalam upaya rekonstruksi bangunan maupun membangun posko-posko pengungsian bagi masyarakat korban bencana.

## **5.2 Saran**

Berikut ini saran-saran penelitian, yang terdiri dari saran akademik dan saran praktis

### **5.2.1 Saran Akademik**

5.2.1.1 Perlu dilakukan penelitian yang lebih detail lagi mengenai karakteristik kegempaan yang dimiliki oleh Sumatera Barat, sebagai bahan persiapan bagi masyarakat untuk meminimalisir korban jika terjadi gempa bumi yang besar seperti yang terjadi pada tahun 2009.

5.2.1.2 Perlu diterbitkan buku pengalaman distribusi logistik terkait bencana di Indonesia sehingga memperkaya khasanah keilmuan terutama dalam upaya distribusi logistik. Mengingat distribusi logistik bencana merupakan suatu disiplin yang baru.

5.2.1.3 Partisipasi TNI AL dalam pendistribusian logistik hanya mengacu kepada pola distribusi logistik pada umumnya hal ini disebabkan belum adanya SOP tentang distribusi logistik pada saat mitigasi bencana. Hal ini didorong pula pada tahun 2009 BPBD di Sumatera Barat belum terbentuk. Sehingga agar pola penanganan bencana memiliki standar baku yang dapat dipergunakan oleh semua organisasi dan institusi maka perlu segera dibuat suatu standar atau SOP khususnya dalam mekanisme distribusi logistik bencana.

## **5.2.2 Saran Praktik**

5.2.2.1 Perlu memperkuat Lantamal II Padang dengan cara:

- a. Penambahan sarana dan prasarana seperti pergudangan, truk dan kapal.
- b. Penambahan jumlah personel

5.2.2.2 Diperlukan adanya SOP khusus tentang pelibatan TNI AL dalam pendistribusian logistik bencana, sehingga tidak terjadi kerancuan dan bantuan yang tidak tepat sasaran.

5.2.2.3 Lebih sering melakukan training, simulasi dan sosialisasi kepada personel Lantamal II mengenai bencana sehingga dapat menambah kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi bencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Qamariyah. & Cepi Triatna..(2005). *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Chen, James Ming. (2012). *Postmodern Disaster Theory*. University of Louisville - Louis D. Brandeis School of Law.
- Creswell, J. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publisher, Inc.
- Dinas Pendidikan & Kebudayaan. (1998) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(vol.219) Jakarta: Balai Pustaka.
- Henslin, James M. (2006). *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta : Erlangga.
- Badudu, J.S. (1994). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, hlm. 271
- LeCompte, M.D. & Preissle, J. (Eds.). (1992). *The Handbook of Qualitative Research in Education*. San Diego, CA: Academic Press.
- Maxwell, Joseph A. (1996). Dalam "*Qualitative research design: an interactive approach*". London: Sage Publisher, Inc.
- Merriam, Sharan B. (1998). Dalam "*Qualitative Research and Case Study Applications in Education*". San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
- Mustafa. Zaenal. (2002). Dalam "*Metodologi Penelitian*". Tidak dipublikasikan.
- Simatupang, M. Togar. (2011). *Pengantar Logistik dan Distribusi*. Disampaikan pada Kuliah Umum di Lingkungan Kementerian
- Sugiyono, (2010). Dalam "*Metode Penelitian Kombinasi*". Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soejono. (1989), *Teori Sosiologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subagya, H (1988). *Manajemen Logistik*. C. V. Haji Masagung. Jakarta.
- Setiawan, Eko. *Seri Bencana: Logistik di dalam Konteks Manajemen Bencana*. retrieved september 30, 2009 from <http://umum.kompasiana.com/2010/04/18>  
30 Menit di Kota Sumatera Barat: Pembelajaran untuk Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Tsunami dari Gempa Bumi

Herdiansyah, Haris.(2010). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : salemba Humanika.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry.(1994). Kamus Ilmiah Populer .Surabaya: Arkola.

Rizqina, Finna. (2010). Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan berbasis sekolah di kecamatan kalideres kotamadya Jakarta barat. Pasca sarjana Universitas Indonesia

Corina Warfield, (2008). The Disaster Management Cycle. [http://www.gdrc.org/uem/disasters/1-dm\\_cycle.html](http://www.gdrc.org/uem/disasters/1-dm_cycle.html)

Khan, Himayatullah at.al. (2008). Disaster Management Cycle – A Theoretical Approach. <[www.mnmk.ro/documents/2008/2008-6.pdf](http://www.mnmk.ro/documents/2008/2008-6.pdf)>(07/06/2013)

Sunarti, Euis. (2012) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. retrieved Juni 24,2013 from <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/03/Dr.-Euis-Sunarti-Partisipasi-Masyarakat-dalam-Pembangunan-Masyarakat.pdf>.

Manajemen bencana. <http://www.un.or.id/id/apa-yang-kami-lakukan/kemitraan-pembangunan/manajemen-bencana>

Perdagangan – Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi. Jakarta retrieved juni 26,2013 from <http://www.slideshare.net/togar/logistik-dan-distribusi-5-desember-2011>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi> (diunduh tanggal 24 juni 2013)

retrieved juni 20,2013 from <http://regional.kompas.com/read/2009/10/15/1023516/1.117.Orang.Meninggal.akibat.Gempa.Sumatera.Barat>

retrieved juni 26,2013 from <http://www.tandef.net/tni-kerahkan-pasukan-reaksi-cepat-tanggulangi-bencana-sumbar>

retrieved juni 26,2013 from <http://news.detik.com/read/2009/10/03/143822/1214472/10/tanggap-darurat-gempa-sumbar-tni-maksimalkan-pasukan-di-daerah>

retrieved juni 26,2013 from

<http://wisnu.blog.stisitelkom.ac.id/files/2011/12/Pengertian-Logistik.doc>.

retrieved juni 26,2013 from

[http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pemasaran/Bab\\_8.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pemasaran/Bab_8.pdf).

<http://www.bnpb.go.id/uploads/pubs/54.pdf>.

<http://www.mdmc.or.id/index.php/download-file/category/6-panduan-tanggap-darurat?download=12:manajemen-logistik-tanggap-darurat>

<http://www.bnpb.go.id/uploads/pubs/561.pdf>.

retrieved juli 08,2013 from <http://www.bappeda.SumateraBarat.go.id/?mod=konten&id=5>

retrieved juli 08,2013 from

[http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Kota\\_Sumatera Barat](http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Kota_Sumatera_Barat)

retrieved juli 08,2013 from

<http://penanggulangankrisis.depkes.go.id/article/view/6/596/GEMPA-7-6-SR-MELANDA-SUMATERA-BARAT.htm>

retrieved juli 27,2013 from

<https://groups.google.com/forum/#!msg/rantaunet/pChb1REqXvl/fZ7ceBf712AJ>

[http://www.tempo.co/read/news/2010/10/12/179284337/Gempa-Bumi-di-Sumatera-Barat-Sejak-Perang-Paderi \[27/07/2013\]](http://www.tempo.co/read/news/2010/10/12/179284337/Gempa-Bumi-di-Sumatera-Barat-Sejak-Perang-Paderi [27/07/2013])

retrieved juli 27,2013 from [http://www.gitews.org/tsunami-kit/id/E4/sumber\\_lainnya/studi\\_kasus\\_30\\_Minut\\_di\\_Kota\\_Sumatera Barat Pembelajaran untuk Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Tsunami dari Gempa Bumi 30 September 2009.pdf](http://www.gitews.org/tsunami-kit/id/E4/sumber_lainnya/studi_kasus_30_Minut_di_Kota_Sumatera_Barat_Pembelajaran_untuk_Kesiapsiagaan_dan_Peringatan_Dini_Tsunami_dari_Gempa_Bumi_30_September_2009.pdf)

Profil Daerah Sumatera Barat, (2006). Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

<http://dda88.blogspot.com/2011/03/sumatera-barat.html>